



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

BULETIN VIRAJATI
MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESKOAD
Edisi XII September 2021

**MENCIPTAKAN KETAHANAN WILAYAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19
UNTUK MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA**



ISSN 2086-9312



9772086931295

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi ke XII bulan September 2021 kembali hadir dihadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi pilihan menarik dan bermanfaat.

Pada kesempatan edisi kali ini, Buletin Virajati Seskoad mengangkat tajuk **“Menciptakan Ketahanan Wilayah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa”**. Tema ini diangkat mencermati sejumlah dampak negatif dari pandemi Covid-19, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah pengangguran, terjadinya kesenjangan ekonomi, terjadinya potensi gangguan keamanan, politisasi untuk kepentingan pragmatis kelompok tertentu, adanya berita hoax, masyarakat rentan terhadap penyakit, adanya konflik dan perpecahan antar kelompok masyarakat. Sehingga dibutuhkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan secara tepat dan sinergis guna mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Selain mengulas materi utama, dalam buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan penting dan menarik, yakni Membangun SDM TNI AD yang Profesional dan Unggul di Era Disrupsi, Konflik Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, Membangun Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI, Kapasitas Personel TNI dalam Deteksi Dini Terorisme, Pengaruh AS terhadap Putusnya Hubungan Diplomatik Negara Venezuela dan Kolombia, Langkah Diplomasi Israel terhadap Negara-Negara Arab dan Strategi Austria dalam Penanganan Pandemi Covid 19, serta beberapa informasi menarik lainnya terkait konflik dan perang di beberapa negara dunia.

Kami berharap berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa dan negara. Demi peningkatan kualitas Buletin Seskoad kedepan, saran masukan pembaca kami nantikan.

Redaksi

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si,

Penasihat

Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Sekretaris Redaksi

Mayor Chb Untung

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Asmadi

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Penata Muda/III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl. Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

http://www.seskoad.mil.id

Facebook

Https://www.facebook.com/Buletinvirajati

Instagram

Https://www.instagram.com/Buletinvirajati

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam “Jurnal Virajati” adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam “Jurnal Virajati” merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi



MENCIPTAKAN KETAHANAN WILAYAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA

DAFTAR ISI

**MENCIPTAKAN KETAHANAN WILAYAH PADA
MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENCEGAH
DISINTEGRASI BANGSA**

Tim Redaksi Buletin Virajati

4

**PENGARUH AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PUTUSNYA HUBUNGAN DIPLOMATIK
NEGARA VENEZUELA DAN NEGARA KOLOMBIA**

Mayor Cba I.K.Arsana Putra, S.T., M.Sc.

**MEMBANGUN SDM TNI AD YANG PROFESSIONAL
DAN UNGGUL DI ERA DISRUPSI**

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc.

11

**LANGKAH DIPLOMASI ISRAEL TERHADAP NEGARA-
NEGARA ARAB GUNA MENCEGAH TERJADINYA
PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL – PALESTINA**

Letkol Inf Duliagus Tumanger, S.T.

**KONFLIK KEPULAUAN SPRATLY
DI LAUT CINA SELATAN**

Major Cba I Ketut Arsana Putra

16

**STRATEGI NEGARA AUSTRIA DALAM PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19**

TIM POK Pasis Dikreg 60 Seskoad TA 2021

**MEMBANGUN MASA DEPAN PAPUA
DALAM BINGKAI NKRI**

Major Arm Nicolau P. Da Silva, S.E., M.I.Pol.

22

**PERISTIWA REVOLUSI BELUDRU DAN
BANGKITNYA SLOVAKIA**

Major Inf Wahyu Widya Sasono

**KAPASITAS PERSONEL TNI
DALAM DETEKSI DINI TERORISME**

Major Ctp Yovi Tridat, S.Kom

27

55

KEMBALINYA HONG KONG KE TIONGKOK

TIM POK Pasis Dikreg 60 Seskoad TA 2021



**CERAMAH PEMBEKALAN
KKL STUDI WILHAN
PASIS DIKREG LXI SEKOAD TA 2021**
SESKOAD, 7 SEPTEMBER 2021



MENCIPTAKAN KETAHANAN WILAYAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK UNTUK MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA

Tim Redaksi Buletin Seskoad

Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan Studi Wilayah Pertahanan (KKL Wilhan) yang akan dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 15 s.d 17 September 2021, Pasis Dikreg LXI Seskoad TA. 2021 menerima ceramah pembekalan dari 3 Pejabat Forkopimda Jawa Timur secara virtual bertempat di Seskoad Bandung, Selasa (7/9/2021). Ceramah pembekalan yang juga diikuti para Pejabat Struktural Seskoad dan para Widyaistrwa, serta para Perwira Penuntun (Patun) dan Dosen Seskoad dari ruang kerjanya masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut mengangkat tema "Aktualisasi peran Satkowil dalam rangka menciptakan ketahanan wilayah pada masa pandemi Covid-19 untuk mencegah disintegrasi bangsa."

Dalam sambutan pengantarnya, Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A., yang diwakili Wadan Seskoad Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa ceramah pembekalan diikuti 461 Pasis Dikreg LXI Seskoad TA. 2021, terdiri dari : Pasis TNI AD 433 orang, Pasis TNI AL 2 orang, Pasis TNI AU 2 orang, Pasis Polri 23 orang dan Pasis Negara Sahabat 1 orang (Australia).

Selain menyampaikan biodata Penceramah, Wadan Seskoad juga memberikan penekanan kepada seluruh Pasis untuk menyimak materi



Wadan Seskoad, Brigadir Jenderal TNI Fulad, S.Sos., M.Si.

Yang disampaikan Penceramah dengan sungguh-sungguh dan mencatat hal-hal penting sebagai bekal dan acuan dalam melaksanakan KKL Studi Wilhan.

Sebagai narasumber pada Ceramah pembekalan KKL Studi Wilhan adalah Gubernur Jatim Dr. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., diwakili Wagub Jatim Dr. Emil Elstianto Dardak, M.Sc. dengan materi **"Peran Pemda Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Wilayah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa"**. Kemudian, Pangdam V/Brw Mayjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. diwakili Kasdam V/Brw Brigjen TNI Agus Setiawan, S.E. dengan materi **"Aktualisasi Peran Satkowil dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Wilayah Pada Masa Pandemi Covid - 19 Untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa"**.

Dan pada sesi ketiga, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K.,S.H.,M.H. diwakili Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, S.H.,M.H. menyampaikan materi dengan judul **“Situational Leadership, Konsep TWT dan 3K dalam Menghadapi Tantangan Global di Era Pandemi”**.

Peran Pemda dalam rangka Menciptakan Ketahanan Wilayah pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa.



Backdrop Paparan Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah indar parawansa, M.Si.

Mengawali ceramah pembekalannya, Wagub Jatim Dr. Emil Elstianto Dardak, M.Sc menyampaikan tentang kondisi demografi dan kultur budaya masyarakat Jawa Timur. Dikatakan Wagub Jatim bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki luas 47,152 KM, terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan dan 8.501 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jabar, yakni sebesar 40.409.880 orang, mayoritas merupakan suku Jawa dan Madura. Sementara kultur budaya masyarakat di Jawa Timur meliputi Mataraman yang terkenal dengan berbahasa Jawa yang halus, kemudian Madura, Arek, Osing dan Tengger.



Backdrop Paparan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc.

Wagub Emil Elstianto Dardak juga menjelaskan tentang visi dan misi Provinsi Jatim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun. Visi Provinsi Jatim adalah : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlik dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. “Sementara arah kebijakan Pemda Jatim pada tahun 2021 ini adalah penguatan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar lulusan Strata-3 *Ritsumeikan Asia Pacific University*, Jepang.

Wagub Jatim juga menguraikan sejumlah tantangan terkait wawasan kebangsaan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur di tengah kondisi ekonomi yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, yakni berkembangnya nilai intoleransi, konsep khilafah, politik identitas, hoax atau informasi yang bohong/salah, radikalisme dan terorisme.

Negara kita, sambung Wagub Jatim juga sedang menghadapi ancaman perang militer dan perang non militer. Ancaman perang non militer antara lain adalah ancaman perang ideologi, perang budaya, perang ekonomi dan perang melawan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang telah muncul sejak Maret 2020 berdampak pada berbagai sektor kehidupan yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, ketertiban dan keamanan. Kondisi ini bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan friksi, bahkan berpotensi menimbulkan ancaman bagi disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, menurut Wagub Emil wawasan kebangsaan harus terus dijaga, pentingnya peran dan memperkuat sinergi lintas elemen.

Sejumlah permasalahan di masyarakat akibat pandemi Covid-19, menurut Wagub Emil antara lain adalah trauma dan gangguan psikologis masyarakat akibat pandemi Covid-19, adanya beberapa warga yang masih menolak vaksin, masih banyak masyarakat yang belum percaya dengan Covid-19, pengambilan paksa jenazah Suspect Covid-19, penolakan penyekatan di perbatasan pada pelaksanaan PPKM, banyaknya tenaga

kesehatan meninggal dunia dan ditolak oleh warga sekitar akibat Covid-19, adanya penolakan pemakaman terhadap warga yang Suspect Covid-19, penolakan penutupan tempat ibadah, adanya beberapa warga yang masih menolak Vaksin, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Sejumlah permasalahan tersebut, tentu membutuhkan penanganan yang tepat, dengan memperkuat sinergi seluruh elemen masyarakat. Diakui oleh Wagub bahwa untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, terkait Covid-19 tidak mudah.

Menurut Wagub masyarakat sudah terpolarisasi, yakni 10 % masyarakat menyatakan bahwa Covid-19 tidak ada atau hanya akal-akalan, sekitar 40% yang lain menyatakan bahwa Covid-19 nyata adanya dan disikapi secara berlebihan dan 40 % lagi menyatakan covid nyata adanya dan harus disikapi secara ekstra hati-hati dan lebih keras lagi. Demikian juga dalam penanganannya, terdapat 2 "mazhab" dalam masyarakat yakni masyarakat harus mampu menjaga dirinya masing-masing dan masyarakat jangan berkegiatan.

Dalam kaitan tersebut, menurut Emil Elstianto Dardak, tugas Pemimpin/pemerintah pada masa pandemi Covid-19, adalah mampu menunjukkan "jalan keluar" dari segala kesulitan, mempercepat pembangunan dan penyerapan anggaran (mencegah resesi), memberi ketenangan pada masyarakat, dan mampu menaklukkan perang narasi, termasuk memerangi narasi kontra produktif melalui media sosial.

Pada bagian lain ceramahnya, Wagub Jatim juga menekankan pentingnya optimalisasi tiga pilar plus yakni Pemda, Kodam dan Polda dalam penguatan pertahanan di daerah serta percepatan penanganan Covid-19, dengan mengoptimalkan peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), peran Forkopimda, peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), membina masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat, membina potensi masyarakat, BPBD dan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta mengoptimalkan forum silaturahmi informal.

Dikemukakan Wagub Jatim Emil Elstianto Dardak bahwa sejumlah kegiatan sinergi antara Gubernur dengan Forkopimda Jatim pada masa Pandemi Covid-19 antara lain adalah pengendalian/percepatan penanganan Covid-19, percepatan program vaksinasi/serbuan vaksinasi, percepatan bantuan sosial (Bansos), patroli bersama (Operasi Yustisi) dan penyekatan di daerah pada pelaksanaan PPKM Darurat, penanganan permasalahan dampak pandemi Covid-19, pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan, penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pembentukan Kampung Tangguh, dan berbagai kegiatan sinergi lainnya. Wagub Emil menyatakan bahwa kebijakan dan langkah-langkah penanganan Covid-19 di Jatim dilakukan melalui komunikasi dan diskusi secara intensif dengan elemen tiga pilar, agar diambil kebijakan yang tepat. Menurutnya, setiap keputusan strategis dilaksanakan bersama tiga pilar. "Sinergi yang kita lakukan seperti vaksinasi, Bansos, operasi yustisi, membentuk kampung tangguh dan menangani permasalahan - permasalahan dampak pandemi," pungkasnya.

Peran Satkowil dalam rangka Menciptakan Ketahanan Wilayah pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa



Pada sesi kedua ceramah pembekalan kepada Pasis Dikreg LXI Seskoad, Kasdam V/Brw Brigjen TNI Agus Setiawan, S.E. menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 merupakan ancaman nyata yang membahayakan keselamatan rakyat, sehingga perlu dibangun ketahanan wilayah, dimana

ketahanan wilayah merupakan kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi segenap aspek kehidupan yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan pembangunan.



Backdrop Paparan KASDAM V/BRW
Brigjen TNI Agus SETIawan, S.E.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdam V/Brw Brigjen TNI Agus Setiawan juga menyampaikan situasi terkini terkait perkembangan Covid-19, dimana perkembangan Covid-19 di Jatim mengalami puncaknya pada tanggal 15 Juli 2021 lalu, yakni kasus terkonfirmasi Covid -19 sebanyak 8.227 orang. Sementara berdasarkan data national bahwa Covid -19 di Jatim sampai dengan tanggal 6 September 2021 pukul 16.00 Wib tercatat menembus angka 387.241.

Brigjen TNI Agus Setiawan juga menguraikan sejumlah dampak negatif dari pandemi Covid-19, yakni pertumbuhan ekonomi menurun, pengangguran meningkat, terjadinya kesenjangan ekonomi, terjadinya potensi gangguan keamanan, politisasi untuk kepentingan pragmatis kelompok tertentu, adanya berita hoax, masyarakat rentan terhadap penyakit, adanya konflik dan perpecahan antar kelompok masyarakat.

Berbagai dampak negatif pandemi Covid-19 tersebut, tentu mengkhawatirkan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan ditengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, menurut Brigjen TNI Agus Setiawan keselamatan rakyat adalah yang utama, menjadi *center gravity* dalam pembangunan.

Demikian juga peran TNI, sambung Agus Setiawan menjadi penting karena TNI memiliki sumber daya yang siap untuk digerakkan.

Dalam kesempatan tersebut, lulusan Akmil tahun 1990 juga menguraikan 4 komponen sumber daya organisasi TNI dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni sumber daya manusia (SDM), materiil, anggaran dan informasi. Untuk komponen SDM, Kodam V/Brw mengerahkan sumber daya manusia organisasi sepertiga kekuatan, yakni 9.159 personel, termasuk didalamnya 335 tenaga kesehatan prajurit TNI dan 320 orang tenaga kesehatan PNS TNI. Sementara sumber daya materiil/sarana prasarana yang dikerahkan dalam penanganan Covid-19 meliputi 40 unit fasilitas kesehatan, berupa 5 buah Rumah Sakit, 5 Rumah Sakit Bantuan, 2 Polkes, 5 Poli/Klinik dan 23 Poskes, 22.797 Isoter, 3 unit rumah sakit lapangan (Rumkitlab), 420 unit kendaraan, dan berbagai sarana prasarana lainnya.

Sedangkan terkait sumber daya informasi, sambung Brigjen TNI Agus Setiawan kegiatan yang dilakukan Kodam V/Brw adalah mengintegrasikan informasi/data antar instansi, menggunakan *dashboard* Covid - 19 Jatim, pengawasan dan pengendalian melalui aplikasi Silacak (sistem informasi pelacakan), Inarisk, Peduli Lindungi dan lain-lain, serta pengendalian data melalui croscek secara langsung oleh Aparat Teritorial.

Dalam penanganan Covid-19 di Jatim, tentu juga didukung dengan sumber daya anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, DIPA Daerah dan bantuan lainnya seperti : oksigen, tempat tidur, masker kain, masker medis, APD (alat pelindung diri), antigen dan lain-lain.

“Sedangkan metode yang digunakan Kodam V/Brw untuk menciptakan ketahanan wilayah pada masa pandemi Covid-19 meliputi 3 T yakni Testing, Tracing, Treatment, sosialisasi protokol Kesehatan (Protkes), penegakan Protkes dan PPKMN, pendampingan penyaluran Bansos, PMI (Pekerja Migran Indonesia), PPKM, vaksinasi dan manajemen media,”ujar Kasdam.

Adapun peran yang dilakukan aparat komando kewilayahan di jajaran Kodam V/Brw, antara lain adalah memantau perkembangan kasus Covid - 19, baik kasus positif baru,

sembuh dan meninggal, mengendalikan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) dan menyiapkan tempat isolasi dan karantina. Sedangkan bagi daerah yang wilayahnya terjadi peningkatan, aparat Komando Kewilayahannya melaksanakan evaluasi dan menambah perkuatan/penebalan pasukan, baik dari Satuan Tempur maupun Satuan Bantuan Tempur. Selain itu, Apkowil juga mengecek dan melengkapi ketersediaan swab antigen, PCR, obat-obatan dan vitamin, melaksanakan penyekatan/pemeriksaan orang keluar masuk desa, kecamatan sampai dengan kabupaten serta mengumpulkan, menyalurkan logistik baik dari pemerintah maupun komponen masyarakat ketika kasus Covid-19 meningkat.

Dalam rangka menciptakan ketahanan wilayah pada masa pandemi Covid - 19, Brigjen TNI Agus Setiawan menjelaskan bahwa Kodam V/Brawijaya menggunakan strategi kerja sama dengan komponen bangsa lainnya, yakni unsur-unsur pentahelix, meliputi Pemerintah, BNPB, TNI-Polri, Kampus/akademisi, media, dokter/tenaga medis/tenaga profesional, pelaku usaha dan industri, LSM, Relawan Community Service, para yokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda. Unsur pentahelix ini menjadi kunci dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Dengan prinsip dan nilai utama (core value) yaitu kepemimpinan, kebersamaan, kesetaraan, kecepatan, kekuatan dan keterbukaan.

Sedangkan pelaksanaan sosialisasi dan pendisiplinan 3 M, menurut Kasdam V/Brw difokuskan pada kegiatan pendisiplinan masyarakat agar menggunakan masker dan menjaga jarak dalam setiap kegiatan. Kegiatan pendisiplinan masyarakat ini, antara lain dilakukan dengan cara menegur masyarakat yang tidak memakai masker, membubarkan kerumunan kelompok masyarakat, melaksanakan patroli, menegur kelompok masyarakat yang tidak menjaga jarak, membagikan masker kepada masyarakat, menegur Rumah Makan yang masih makan di tempat, melaksanakan pengawasan tempat wisata dan hiburan serta taman kota, memberikan logistik kepada masyarakat yang

melaksanakan isolasi mandiri, mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan olah raga secara kelompok dan memberikan bantuan pemakaman korban Covid-19.

Selain itu, Kodam V/Brw menurut Brigjen TNI Agus Setiawan juga melaksanakan berbagai kegiatan bakti TNI, seperti pembagian beras kepada masyarakat yang terdampak (sebanyak 2.456 Ton), pembagian masker kepada masyarakat, melaksanakan Donor Darah, melaksanakan Donor Plasma Konvalesen, penyemprotan desinfektan, mendampingi pembentukan Kampung Tangguh, membantu kegiatan vaksinasi, dan pemberian paket Sembako (sebanyak 15.000 paket).

Terkait dengan percepatan vaksinasi, dengan total sasaran vaksinasi sebesar 31.826.206 dosis (sementara total pencapaian vaksinasi Kodam V/Brawijaya s.d 6 September 2021 mencapai 1.217.189 dosis), maka kegiatan yang dilakukan Kodam V/Brw adalah Pertama, melatih anggota menjadi bagian tenaga vaksin terutama di bagian input data dan cetak dokumen, Kedua, memperhatikan sektor-sektor yang menghambat pada pelaksanaan vaksinasi, terutama berkaitan dengan jaringan internet, kurangnya tenaga dibidang input data serta cetak dokumen, Ketiga, melakukan koordinasi dan saling bekerja sama dengan Kadinkes Kabupaten/Kota tentang stok vaksin masing-masing untuk membuat strategi percepatan vaksin, Keempat, menentukan wilayah yang animo masyarakatnya tinggi, agar diberikan penambahan dosis, Kelima, melaksanakan terobosan dan ide terbaik, untuk melaksanakan percepatan vaksinasi, meskipun membutuhkan waktu dan tenaga yang melelahkan, dan Keenam, adalah keikhlasan dalam melaksanakan tugas, sebagai kunci untuk meraih kesuksesan. Sedangkan terkait sumber daya manajemen media, kegiatan yang dilakukan Kodam V/Brw adalah pembentukan Satgas Penerangan, sosialisasi/himbauan Protkes/Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19, publikasi kegiatan penanganan Covid 19 dan melakukan klarifikasi serta kontra berita hoaks.

Untuk hambatan yang dihadapi Kodam

V/Brw dalam penanganan Covid 19, menurut Brigjen TNI Agus Setiawan adalah terbatasnya tenaga Kesehatan, Covid -19 merupakan wabah baru sehingga pengetahuan terbatas, belum adanya pola/metode yang tetap dalam penanganan pandemi Covid-19, kemampuan anggota bidang IT terbatas, lemahnya sistem dan interoperabilitas data, kesadaran masyarakat rendah, keterbatasan jumlah Aparat Teritorial, keterbatasan anggaran, keterbatasan jumlah vaksin dan keterbatasan alat dan tenaga kesehatan melakukan testing (rapid antigen maupun PCR)

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan Covid-19, maka Kodam V/Brw melakukan berbagai upaya, antara lain adalah : melakukan pelatihan tenaga kesehatan/vaksinator dari 760 menjadi 1.098, membuat mekanisme pola vaksin yang efektif, melakukan sosialisasi dan peningkatan kemampuan anggota dalam tugas-tugas penanganan Covid, pelatihan anggota Babinsa bidang Teknologi Informasi (Silacak, Input Data, Inarisk, Peduli Lindungi), pengendalian dan pemantauan penggunaan aplikasi, sikronisasi data dengan *cross check* secara langsung ke lapangan/manual, *refocusing* anggaran sesuai arahan dan optimalisasi dukungan anggaran baik bersumber dari APBN, APBD maupun bantuan lain, peningkatan kesadaran masyarakat tentang Protkes, aturan isolasi/vaksinasi, penebalan kekuatan dengan Satpur/Banpur sesuai kebutuhan dan eskalasi, memperkuat kerjasama dengan komponen bangsa lainnya dan pemberdayaan Perwira Tinggi dan Pejabat Utama/Pamen Kodam untuk melakukan pengawasan dan evaluasi serta asistensi penanganan Covid-19 di wilayah Kodam V/Brw baik internal maupun eksternal.

Situational Leadership, Konsep TWT dan 3K dalam Menghadapi Tantangan Global di Era Pandemi.

Pada sesi terakhir ceramah pembekalan kepada Pasis Dikreg LXI Seskoad, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, S.H.,M.H., menyampaikan materi tentang Situational Leadership, Konsep TWT dan 3K dalam Menghadapi Tantangan Global di Era Pandemi. Ceramah pembekalan Wakapolda Jatim diawali dengan menyampaikan perkembangan lingkungan strategis, termasuk di tingkat domistik dan lokal. Perkembangan lingkungan strategis ditingkat domistik, menurut Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo antara lain adalah kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional; Isu Polhukam (khususnya Otsus) dan HAM di Papua; Bencana Alam dan Karhutla; dan Pro Kontra UU Cipta Kerja (Gugatan MK).



Backdrop Paparan Wakapolda Jawa Timur
Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, S.H., M.H.

Sementara perkembangan lingkungan strategis ditingkat lokal, menurut Wakapolda Jatim adalah Efek Kemenangan Taliban di Indonesia; Mural Jokowi; Vandalisme (Corat Coret Baliho), Rencana Aksi Unras OKP Cipayung Plus; Isu Parpol Baru; Hate Speech / Penistaan Agama; Isu-isu Kerumunan (Hajatan, Vaksinasi dan sebagainya), Rencana PON Papua pada bulan Oktober 2021; Liga 1 dan Liga 2 Indonesia ditengah pandemi; Aktifitas Perguruan Pencak Silat di bulan Syuro; dan Pekerja Imigran Indonesia; serta Penyesuaian hidup Adaptasi Kebiasaan Baru.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Jatim juga menyampaikan kembali terkait penekanan Presiden RI Ir. Joko Widodo pada saat pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim TNI) dan Polri 2021, antara lain adalah Pertama, melaksanakan pengendalian Covid-19 serta aktif mendisiplinkan 3 M, mendukung 3 M dan PPKM berskala Mikro; Kedua, mendukung pelaksanaan vaksinasi massal untuk menghasilkan herd immunity, TNI dan Polri berperan dalam kelancaran proses distribusi, pengamanan vaksin



Backdrop Paparan Kapolda Jawa Timur
Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.

termasuk vaksinator; dan Ketiga, menjaga profesionalitas dan sinergitas TNI dan Polri, sebagai penjaga kekuatan dan inovasi bangsa menuju Indonesia Maju.

“Dalam situasi pandemi, TNI-Polri harus mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Kebhinnekaan Indonesia merupakan tanggungjawab bersama, TNI/Polri sebagai penjuru terdepan”, ungkap Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo.

Lebih lanjut, dikemukakan Wakapolda bahwa pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya ke-pemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memerintah, memberi instruksi, mendelegasi, atau tindakan lainnya yang dianggap perlu.

“Teori kepemimpinan situasional sangat mengedepankan fleksibilitas. Teori ini merupakan landasan dalam menggagas konsep TWT (Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab) Kapolda Jatim. Konsep TWT juga didukung dengan asas pengorganisasian menurut George R. Terry (1958) dalam teori manajemen, yakni tujuan, pembagian tugas, penempatan tenaga kerja, wewenang dan tanggung jawab serta pelimpahan wewenang”, tandas Wakapolda.

Dikaitkan dengan konsep TWT tersebut, menurut Wakapolda Jatim dalam implementasi-nya seluruh personel Polda Jatim harus mengerti dan memahami TWT-nya masing-masing, yakni setiap anggota harus memahami akan tugasnya, didalam melaksanakan tugas, anggota juga diberikan wewenang dan setelah melaksanakan tugasnya maka bentuk tanggung jawab anggota adalah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas, sambung Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, maka perlu perencanaan secara rinci, sehingga perlu mempedomani 3K antara lain komunikasi, koordinasi dan kolaborasi.

Terkait hal tersebut, Wakapolda juga menyampaikan Teori Kerjasama (Thomson dan Perry, 2006), bahwa kerjasama merupakan kegiatan yang mempunyai tingkatan berbeda dimulai dari tahapan koordinasi juga kooperasi sampai terjadinya kolaborasi dalam suatu kegiatan kerjasama. Kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi, yaitu kolaborasi.

“Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana kooperasi terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan kolaborasi pada tingkatan yang paling tinggi,” ungkap Wakapolda.

Untuk memperkuat Konsep TWT dan 3K, Wakapolda juga menyampaikan Teori sinergitas (James A. F. Stoner and Charles Wankel, 1986), bahwa tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

“Dengan menerapkan pola kerja TWT (tugas, wewenang dan tanggung) dan 3 K (komunikasi, koordinasi dan kolaborasi) maka akan mencapai keberhasilan. Dalam penanganan Covid-19, tidak dapat dilakukan secara ego sektoral, sendiri-sendiri, namun butuh kekuatan dan energi yang luar biasa, butuh keterlibatan semua pihak”, pungkasnya.



Tim Redaksi Buletin Virajati



MEMBANGUN SDM TNI AD YANG PROFESIONAL DAN UNGGUL DI ERA DISRUPTIF

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc.

"Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful"

(Integritas tanpa pengetahuan lemah dan tidak berguna, tetapi pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan)

Samuel Johnson (1709-1784)
Sastrawan Inggris

Pendahuluan

Disrupsi dapat digambarkan sebagai suatu perubahan drastis yang melenceng dari kebiasaan/tradisi yang telah ajeg/mapan. Disrupsi terjadi hampir di semua bidang kehidupan, dan terutama didorong oleh perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang sangat kuat. Barometer peradaban kini melaju dengan cepat dalam bingkai revolusi industri 4.0. Gempuran di berbagai ranah dan kepungan teknologi yang serba disruptif, mulai dari Internet of Things (IoT), big data, automasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensia artificial berhasil menorehkan penandaan besar dalam sejarah angka 4.0 di belakang revolusi industri.

Di dunia pendidikan, disrupsi diterjemahkan dengan perubahan paradigma pembangunan SDM. Di era milenial seperti saat ini, pembangunan SDM selalu berorientasi pada tuntutan dunia kerja,

perkembangan teknologi, dan budaya interkoneksi, yang ketiganya juga merupakan elemen utama dari revolusi industri keempat. Di masa depan profesi-profesi baru diprediksi akan muncul dan menggeser sebagian tugas dan peranan yang ada dalam job description jabatan-jabatan di perusahaan atau organisasi, termasuk di satuan-satuan militer.

Hal ini menuntut adanya perubahan dalam pola rekrutmen personel yang akan semakin terstruktur menurut domain keahlian dan tingkat pendidikan. Sampai pada pola pendidikan di lingkup militer, keputusan pengarahan pembinaan karier pun menjadi ranah yang harus diantisipasi.

Sebagai contoh kita akan melihat ke depan para lulusan SMA/SMK masing-masing akan dan telah memiliki skill dan preferensi bidang kerja yang ditempuhnya selama sekolah, maka akan sangat disayangkan bila TNI AD tidak memasukkan prasyarat skill tersebut dalam proses rekrutmen. Di samping itu, karena sejak masa pendidikan dasar setiap calon prajurit diharuskan memenuhi kompetensi dasar prajurit dan spesialisasi yang menentukan kecabangan dan bidang tugasnya, maka prasyarat tersebut sudah dapat dilihat dari tahapan awal rekrutmen. Namun, tidak hanya itu.

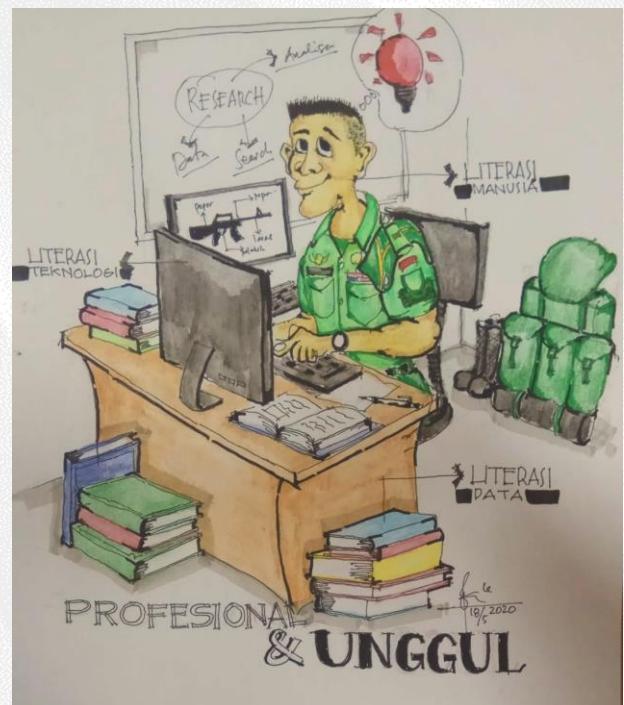
Dengan bermunculannya kursus, pendidikan, dan sertifikasi keahlian secara online, ke depan TNI AD dihadapkan pada pilihan untuk merombak manajemen pendidikan yang menawarkan penghematan anggaran, atau tetap pada pola lama (juga) dengan risiko kita tetap menggunakan literasi lama sementara tantangan zaman dan kebutuhan organisasi sudah berubah. Dengan pola pendidikan korespondensi/off-campus menjadi distance learning yang lebih luas dengan modul-modul pelajaran dalam bentuk multimedia dan mengurangi porsi pendidikan in-campus hanya pada tahap-tahap pembulatan materi dan latihan/praktik aplikasi sesuai sasaran pendidikan.

Lebih lanjut, disrupti di bidang pendidikan juga membuka peluang pembinaan personel TNI AD yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan career by design. Kompetensi dan potensi pengembangan karier personel TNI AD sudah dapat direncanakan dan diprediksi sejak tahap seleksi dan Dikma. Berkat standar kelulusan dan pola pendidikan di sekolah dasar dan menengah yang akan berorientasi pada keahlian yang aplikatif di dunia kerja, Staf Personel Angkatan Darat sejak dini sudah dapat merencanakan perjalanan karier setiap personel. Dengan terbukanya peluang pendidikan keahlian non-formal, serta pemberlakuan sertifikasi kompetensi yang berstandar nasional bagi seluruh pekerja dan mitra Pemerintah, maka kesempatan bagi setiap personel untuk mengembangkan keahliannya akan semakin luas dan diakui baik secara internal maupun di luar lingkungan TNI AD. Inilah salah satu jalan untuk membuka khasanah pembinaan karier dan profesi personel TNI AD.

Literasi baru dalam bidang data, teknologi, dan manusia.

Yang dibutuhkan TNI AD adalah membangun kemampuan budaya literasi pada segenap stakeholder sampai lapis prajurit terendah. Rendahnya kemampuan budaya literasi tentu akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang akan menghadapi era revolusi industri 4.0. Literasi (Latin: literatus) berarti orang yang belajar.

National Institut for Literacy menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Kita sadari bahwa aspek manusia menduduki posisi vital dan strategis dalam melaksanakan tugas pokok organisasi. Langkah konkret yang seharusnya ditempuh adalah meningkatkan kemampuan budaya literasi baru yang memungkinkan seseorang dapat mengaplikasikan literasi baru berupa Literasi Data, yaitu kemampuan untuk membaca dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital, Literasi Teknologi yaitu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (Coding, Artificial Intelligence, Engineering Principles, dan Biotech), dan Literasi Manusia yaitu humanities, komunikasi, dan desain. Kesemuanya akan dijadikan modal dasar untuk berkiprah di masyarakat.



SDM Profesional dan Unggul

Itulah sebabnya mengapa kita selalu menekankan bahwa sebaik apa pun data dan teknologi yang dikuasai, apabila mental manusia rusak tanpa adanya integritas, itu semua tidak akan bermanfaat bagi Indonesia. Jawaban yang dibutuhkan adalah lahirnya manusia profesional dan unggul.

Profesionalisme mencakup kriteria expertise (keahlian), responsibility (tanggung jawab), dan corporateness (kebersamaan). SDM profesional bukan semata-mata ahli, tetapi dia harus memiliki rasa tanggung jawab berupa integritas pribadi dan kebersamaan dalam jiwa korsa kesejawatan yang memadai. Demikian pula Indonesia membutuhkan manusia unggul dengan inovasi-inovasi yang disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. SDM unggul tidak hanya mereka yang berpendidikan tinggi, tidak hanya mereka yang memiliki fisik sehat, tetapi mereka yang mempunyai hati, jiwa Indonesia, dan mampu memberikan kontribusi nyata kepada Indonesia apa pun kondisinya.

Literasi baru di lingkup militer

Kondisi dinamis ini tentu membawa konsekuensi logis pada dunia militer terlebih dalam aspek SDM-nya yang sangat krusial. Norma pengawakan organisasi TNI AD harus didukung oleh orang-orang yang kompeten. Pembinaan profesi berbasis kompetensi dan kinerja sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan karier personel TNI AD.

Yang dilakukan adalah bukan hanya penguatan kompetensi literasi lama, tetapi secara simultan mengokohkan pada penguatan literasi baru yang menyatu dalam penguatan kompetensi bidang keilmuan dan keahlian atau profesi. Dengan demikian, diperlukan reorientasi baru dalam perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan prajurit berupa rekrutmen, pendidikan di lingkungan militer yang meliputi pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan, sampai pada bidang penggunaan personel yang mengatur sistem pembinaan karier prajurit.

PERMASALAHAN DAN POKOK-POKOK persoalan

Literasi Data.

Literasi data merupakan literasi yang terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi (big data) yang diperoleh. Di era disruptif data menjadi sangat penting untuk dimaknai dan dipelajari karena dengan

keberadaannya dapat dipahami bagaimana kondisi yang sedang terjadi pada masa kini dan masa lalu. Data dapat pula menjadi pedoman untuk melakukan sesuatu agar lebih efisien dan lebih baik lagi, teknologi digital sangat berperan pada hampir semua lini kegiatan yang dilakukan masyarakat. Data yang telah diolah dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, demikian juga bisa untuk mengevaluasi suatu kegiatan.

Secara global big data adalah data tentang banyak hal yang terkumpul dalam volume berukuran sangat besar (kadang tidak terstruktur) dengan kecepatan yang cepat. Big data dapat dianalisis dan diolah untuk keperluan pengambilan keputusan (*decision making*), strategi bisnis, dan prediksi bisnis. Di lingkup TNI AD yang terjadi adalah belum tersedianya secara maksimal basis data menyangkut personel, logistik, dan data primer lain yang akurat dan siap cepat saji untuk dijadikan bahan dasar pengambilan keputusan user (Pimpinan) berdasarkan masukan produsen (Badan Litbang).

Demikian pula terdapat kendala berupa rendahnya kualitas hasil penelitian di lapangan karena terdapat gap antara user dan produsen. Memang saat ini sudah diselenggarakan Sisfopers, Sisfolog, dan Simak BMN, tetapi core problemnya adalah masih rendahnya pengambilan keputusan dan kebijakan yang berbasis data dan evidence (bukti). Gap yang ada menjadi amplifier masalah, banyak kebijakan yang dipandang kurang relevan bahkan bukan menyelesaikan masalah malah menimbulkan polemik baru, misal masalah perbedaan data kekuatan nyata personel di Spersad, Disinfohadtad, dan Ditkuad, stagnasi dan menumpuknya jabatan Pati/Kolonel akibat dampak perpanjangan usia pensiun perwira (sebelum ada terobosan Kasad terkait pengembangan organisasi dan penambahan jabatan fungsional), atau pengadaan barang dan jasa yang mendasarkan big data pendukungnya.

Permasalahan mendasar dalam pengembangan SDM TNI AD adalah *policy* tidak dibangun atas dasar *evident base* karena tidak tersedianya basis data atau *evidence* yang cukup.

Lembaga litbang berpotensi menghasilkan produk kajian yang dapat dijadikan basis pengambilan keputusan atau kebijakan, tetapi kurang diberdayakan sehingga terjadi gap antara *user* (Pimpinan) dengan produsen kajian (Litbang). Hal ini berpotensi menjadi akar permasalahan dalam pembinaan SDM karena dibuat tanpa landasan data yang valid dan reliabel.

Literasi Teknologi.

Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet, memahami cara kerja mesin, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Aplikasi teknologi dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal. Permasalahan yang bisa kita temui kenapa kita selalu tertinggal dalam pengembangan soft dan hard power adalah karena kita melakukan apa yang dinamakan evident base policy. Kondisi ini menyebabkan pengembangan Alutsista dan strategi lainnya tidak diikuti oleh perkembangan SDM-nya, pengembangan industri pertahanan seharusnya mengutamakan kemandirian produksi dalam negeri, walau tetap kerja sama dengan luar negeri dalam rangka transfer teknologi dan kerja sama produksi.

Literasi Manusia.

Literasi manusia terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Faktor dominan lain yang terjadi adalah karena SDM belum dipandang sebagai human capital. Jadi, ada kesenjangan antara pembuat kebijakan dengan knowledge, sehingga diperlukan jembatan. Salah satu bentuk dari human capital adalah investment on people yakni character building. Tujuan human capital adalah menganggap manusia sebagai aset yang harus diinvestasikan (pendidikan, pelatihan, dan kesehatan) agar kinerja meningkat. Investment dalam human capital juga untuk meningkatkan produktivitas bukan sebagai alat seleksi karier, tetapi sebagai penunjang karier.

Menurut analisis Arnaldo Pellini, dkk. tentang knowledge based policy making agar kebijakan yang berbasis evidance dan knowledge menjadi kuat maka perlu ada suplai, ada demand, dan ada transfer pengetahuan. Karena rendahnya literasi maka yang terjadi adalah sebagai berikut.

Pertama, kurangnya suplai pengetahuan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kebijakan yang dihasilkan oleh produsen pengetahuan: Universitas, Pusat Penelitian yang ada di perguruan tinggi, atau TNI AD di pemerintahan atau di masyarakat sipil. Kedua, kurangnya demand terhadap pengetahuan yang tinggi dari pengguna pengetahuan, yaitu pengambil kebijakan di TNI AD. Ketiga, tidak adanya transfer pengetahuan yang cepat dan tepat dari produsen ke user, sehingga setiap gagasan inovatif yang muncul dari sisi produsen, tidak bisa segera ditangkap oleh pengambil kebijakan sebagai user, dan diadopsi menjadi kebijakan TNI AD yang baru dan inovatif.

SOLUSI DAN REKOMENDASI

Perlunya *grand strategy* pembinaan personel di lingkungan TNI AD.

Pembinaan personel yang direncanakan dan dilaksanakan oleh TNI AD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung tugas-tugas yang dibebankan oleh negara, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ketidakseimbangan dalam pembinaan personel yang menyebabkan stagnasi jabatan mengakibatkan timbulnya inefisiensi anggaran yang pada gilirannya membawa persoalan personel menjadi problem yang lebih kompleks, bahkan berpotensi merusak kultur organisasi.

Untuk itu diperlukan suatu reformasi atau pembenahan sistemik dalam pembinaan personel, khususnya dalam bidang rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan profesi dan karier. Pemberian dalam ketiga aspek Siklus Binpers tersebut harus diwadahi dalam suatu konsep manajemen SDM di level strategis/kebijakan serta dijabarkan dalam suatu *grand strategy* pembinaan personel dalam rangka mendapatkan SDM TNI AD yang profesional dan unggul.

Upaya sebagai Rekomendasi yang perlu dilakukan.

Beberapa upaya yang perlu direkomendasikan untuk mendapatkan peningkatan SDM TNI AD adalah sebagai berikut.

Pertama, perlunya knowledge outsourcing yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bahan pertimbangan mengingat rendahnya literasi di ketiga aspek literasi baru sementara desakan waktu akan kebutuhan organisasi maka diperlukan transfer pengetahuan dari luar baik Kementerian/Lembaga ataupun badan instansi kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan asistensi secara proporsional.

Kedua, menggunakan *big data* secara konsisten dan diawaki oleh personel/SDM yang profesional dan unggul dengan cara melanjutkan program Sisfopers secara profesional dan konsisten dengan meng-update-data secara terus-menerus dalam akurasi data yang valid dan ter-connect dengan Kotama Balakpus secara optimal. Hal ini dijadikan sebagai big data semua urusan pembinaan personel, dan terintegrasi dengan Sisfolog dan Simak BMN di lingkup Mabesad sebagai upaya optimalisasi fungsi personel, logistik, dan akuntabilitas penyelenggaranya. Perlu dipertimbangkan adanya pengadaan satelit tersendiri untuk mengakomodasi big data tingkat Mabes AD.

Ketiga, diperlukan rekrutmen khusus prajurit bertalenta dan memiliki kompetensi khusus komputer/IT, dan berkemampuan khusus di teknologi digital, dan AI, baik kelompok Perwira PK maupun Caba PK Talenta, sehingga selain kemampuan menjadi prioritas, mereka tetap dalam status prajurit yang diikat dengan Sumpah Prajurit dan Saptamarga.

Keempat, bila dipandang perlu dan mendesak maka kita dapat mengangkat tenaga PPPK khususnya bidang pendidikan IT/AI yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Per BKN tentang Juknis Pengadaan PPPK, khususnya bagi mengisi jabatan khusus Artificial Intelligen, komputasi awan, hacker, dan berkemampuan luar biasa di bidang IT/digital, dengan persyaratan melalui litpers khusus sesuai ketentuan/regulasi di organisasi TNI AD.

Kelima, memberdayakan fungsi/badan Litbang TNI AD dengan membekali organisasi Dislitbangad dan diisi personel profesional, serta unggul sesuai kompetensi jabatan yang dipersyaratkan khususnya bidang scienties dengan posisi tawar yang tinggi karena aspek kelebihan dalam binkar dan kesejahteraan personel ahlinya. Tentu saja harus dipersyaratkan adanya akreditasi dan bagi mereka yang memiliki persyaratan khusus peneliti dan berkualifikasi psikologi Litbang pada tingkatan tertentu. Dispsiad dan Srenaad dapat melakukan validasi secara proporsional sehingga sebagai badan suplai ke user (Pimpinan) TNI AD akan senantiasa memberikan pertimbangan akurat dan profesional bagi pengambilan keputusannya.

Keenam, khusus penanganan aspek manusia walaupun kurikulum akan berkembang sesuai tuntutan teknologi digital dan pembatasan kelas tatap muka dengan e-Learning dan sistem teleconference, tetapi untuk pembentukan character building tetap menuntut pertemuan kelas, tatap muka, dan penyampaian/pewarisan nilai-nilai kepejuangan, religius, dan emotional quotient. Jadi, khusus Dikma dan Diktuk tetap memadukan kurikulum secara proporsional dengan sistem yang dikembangkan secara profesional dan terukur.

Dengan upaya sebagai rekomendasi ini diharapkan permasalahan yang terjadi berupa rendahnya kualitas SDM dan lemahnya dalam literasi baru dapat diatasi dengan segera dan tetap memperhatikan asas prioritas. Harus disadari bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, profesionalisme adalah kunci kemajuan organisasi modern dalam persaingan di dunia yang sangat dinamis. TNI AD dengan tekad menjadi world class army tidak boleh bertahan pada budaya atau pola kerja yang lama dan terlambat beradaptasi. Kemajuan Alutsista yang demikian pesat harus diimbangi dengan perubahan paradigma pembinaan personel yang berbasis kompetensi dan kinerja.

Brigjen TNI Agung zamani, M.Sc. Adalah Abituren Sepamilwa 1989/1990 gelombang I dan saat ini menjabat sebagai Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Intekmil Mabesad



KONFLIK KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN

Mayor Cba I Ketut Arsana Putra

Pendahuluan

Saat ini ketegangan semakin meningkat di berbagai wilayah Asia. Perang, tidak ada rasa aman, terorisme dan ketakutan akan ancaman senjata nuklir menghantui beberapa kawasan seperti Timur-Tengah dengan isu senjata nuklir Iran dan Israel, di Asia Selatan perrusuhan antara India dan Pakistan yang bermuara pada persaingan kepemilikan senjata nuklir, serta yang juga mencemaskan adalah isu ancaman senjata nuklir Korea Utara di Semenanjung Korea.

Segala krisis dunia yang mengancam ini, khususnya wilayah Asia-Pasifik telah membawa dampak besar pada keamanan penduduk, perkembangan ekonomi serta kelestarian lingkungan hidup. Sengketa untuk memperebutkan hak milik atau klaim suatu wilayah, untuk menguasai serta memperoleh bagian dari sumber daya alam memegang peranan penting dalam berbagai konflik yang terjadi. Di jaman globalisasi ini persaingan menguasai serta memperoleh sumber daya alam merupakan isu utama dalam hubungan geopolitik antar negara-negara di dunia.

Salah satu isu konflik saling klaim wilayah (berhubungan dengan sumber daya alam) yang sering terjadi melibatkan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik adalah mengenai konflik Kepulauan Spratly di kawasan Laut China Selatan.

Kepulauan Spratly merupakan wilayah gugusan pulau karang beserta perairan yang terkenal kaya akan sumber daya yaitu gas alam serta ikan. Wilayah Kepulauan Spratly saat ini diklaim oleh 6 negara yaitu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei serta Filipina. Keenam negara tersebut masing-masing memiliki bukti sejarah yang kuat untuk dapat mengklaim wilayah itu. Tumpang tindihnya klaim atas wilayah tersebut telah beberapa kali menyebabkan insiden yang diikuti ketegangan hubungan diantara enam negara tersebut.

Globalisasi dengan segala pengaruhnya telah membawa perkembangan ekonomi yang begitu pesat di seluruh dunia termasuk negara-negara di Asia-Pasifik. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat ditandai dengan munculnya industri-industri di beberapa negara berkembang, mau tidak mau akan menimbulkan persaingan dan membutuhkan sumber daya untuk menggerakkan perindustrian masing-masing negara.

Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energi utama, membuat dunia berusaha untuk dapat menemukan sumber energi baru selain minyak bumi. Salah satunya adalah gas alam yang masih melimpah keberadaanya di dunia.

Itulah isu utama yang menyebabkan perebutan klaim kepemilikan Kepulauan Spratly akhir-akhir ini muncul kembali. Perkembangan China sebagai salah satu negara industri baru dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di dunia, telah menambah panas suhu konflik di kawasan Asia-Pasifik khususnya di Laut China Selatan. Kawasan Laut China Selatan merupakan jalur transportasi laut yang sangat strategis di dunia, selain juga kaya dengan sumber daya gas alam dan sumber ikan. Kawasan ini merupakan jalur transportasi minyak bumi dari Timur-Tengah menuju Asia-Pasifik yaitu China, Korea Selatan, Jepang serta California Amerika Serikat. Thailand, Kamboja, dan Indonesia juga secara diam-diam terancam jika satu negara atau lebih berhasil mendaulat sebagai pemilik kepulauan itu. Masalahnya, jika ada negara yang mengklaim kepulauan itu, eksplorasi migas yang dimiliki Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Kamboja akan terancam menjadi bagian dari wilayah Spratly. Dengan memiliki Spratly, satu negara akan menarik garis zona ekonomi eksklusif (ZEE), yang menjadi haknya. Untungnya, sebagaimana ditulis di situs Global Security, wilayah ZEE tidak boleh ditarik dari pulau karang yang tidak layak huni.



Peta wilayah Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan

Pembahasan

Sejarah Kepulauan Spratly

Kepulauan Spratly terletak di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly hanyalah kumpulan pulau kecil yang tak layak dihuni dan merupakan daratan kecil yang terdiri dari permukaan karang. Semenjak dahulu wilayah ini telah menjadi kawasan yang cukup menarik, ini terbukti wilayah Kepulauan Spratly telah menjadi incaran kolonial Eropa. Nama Kepulauan Spratly diambil dari nama seorang marinir yang bernama Richard Spratly, ada juga yang menyebutnya sebagai William Spratly, yang pernah mendatangi kepulauan itu. Sampai saat ini tumpah tindih klaim kepemilikan Kepulauan Spratly terus terjadi. Enam negara yang mengklaim paling berhak atas wilayah tersebut, yakni China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina, masing-masing mengakui bahwa wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari teritorinya. China menyatakan, kepulauan itu merupakan bagian dari Provinsi Hainan, Filipina menyatakan kepulauan itu bagian dari Provinsi Palawan, Vietnam menyatakan wilayah itu bagian dari Provinsi Khanh Hoa. Malaysia menyatakan, wilayah itu bagian dari Negara Bagian Sabah. Taiwan juga menyatakan wilayah itu bagian dari pemerintahan Kaohsiung.

Seiring mulai menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energi serta ditemukannya potensi cadangan sumber daya alam yang begitu besar di Laut China Selatan khususnya di sekitar Kepulauan Spratly telah menambah potensi konflik. Pada tahun 1968, cadangan minyak dan gas ditemukan. Kementerian Sumber Daya Mineral dan Geologi China menaksir ada kekayaan minyak dan gas alam sekitar 17,7 miliar ton di sana. Bandingkan dengan cadangan migas Kuwait yang hanya 13 miliar ton. Wilayah ini juga kaya ikan. Delapan persen total penangkapan ikan China terjadi di wilayah ini.

Secara geografis Kawasan Laut China Selatan dikelilingi oleh sepuluh negara pantai yaitu China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, serta Filipina. Kawasan Laut China bila dilihat dari tata lautan internasional

merupakan kawasan strategis, mengandung nilai ekonomi tinggi karena mengandung banyak potensi cadangan sumber daya alam. Disinilah mulai timbul konflik kepentingan beberapa negara di kawasan ini. Sebenarnya di kawasan ini banyak potensi konflik yang terjadi, tapi potensi konflik yang paling sensitif yang memungkinkan terjadinya perang terbuka adalah klaim kepemilikan terhadap Kepulauan Spratly. Seperti disebutkan diatas klaim atas Kepulauan Spratly diakui oleh enam negara, dimana masing-masing negara memiliki nama atas Kepulauan Spratly seperti Taiwan menamakan Kepulauan Spratly dengan Shinnengunto, Vietnam menyebut Truong Sa, Filipina menyebut Kalayaan, Malaysia menyebut Itu Abaa dan Terumbu Layang-Layang dan China menyebut Nansha Quadao, masyarakat internasional menyebut Kepulauan Spratly. Konflik atas klaim wilayah Kepulauan Spratly mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa, penguasaan atas Kepulauan Spratly telah melibatkan banyak negara yaitu Inggris, Prancis, Jepang, China, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan serta Filipina. Sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan bukan sebatas pada kedaulatan atas sebuah pulau-pulau, tetapi bercampur dengan pengakuan terhadap landas kontinen di laut serta ZEE.

Konflik Kepulauan Spratly

Sengketa wilayah dan penguasaan kepulauan di Laut China Selatan, di awali oleh tuntutan China atas kepemilikan seluruh pulau-pulau yang ada di Laut China Selatan termasuk di dalamnya adalah Kepulauan Spratly. China mengakui kedaulatan di Laut China Selatan berdasarkan sejarah serta dokumen-dokumen kuno. Menurut China sejak 2000 tahun yang lalu, perairan ini telah menjadi jalur transportasinya. Namun di lain pihak yaitu Vietnam membantah serta tidak mengakui klaim kepemilikan wilayah terhadap Kepulauan Spratly. Bahkan, Vietnam menyatakan wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari wilayah negaranya. Vietnam mengakui wilayah Kepulauan Spratly dan sekitarnya merupakan bagian dari teritorinya sejak abad ke-17.

Akibat perebutan pengakuan wilayah atas Kepulauan Spratly antara China dan Vietnam, pada tahun 1988 terjadi insiden antara Angkatan Laut China dan Angkatan Laut Vietnam. Insiden ini terjadi dimana kapal Angkatan Laut Vietnam yang sedang berlayar di Laut China Selatan dicegat oleh kapal perang Angkatan Laut China, sehingga bentrokan tidak dapat dihindari. Dalam bentrokan ini Angkatan Laut Vietnam kehilangan 74 prajuritnya. Akibat dari insiden ini, Vietnam memutuskan hubungan diplomatik dengan China, walaupun beberapa tahun kemudian hubungan diplomatik kedua negara berlangsung normal kembali.

Dalam perkembangannya, selain China dan Vietnam, Filipina pun mengakui kedaulatannya atas wilayah Kepulauan Spratly. Filipina yang menyebut Kepulauan Spratly dengan nama Kalayaan. Adapun alasan Filipina mengakui serta menduduki Kepulauan Spratly bagian timur, karena kawasan tersebut tidak bertuan atau kosong. Filipina juga menunjukkan Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951, dimana dalam perjanjian tersebut Jepang melepaskan kedaulatannya atas Kepulauan Spratly, tapi tidak disebutkan diserahkan kepada negara manapun. Filipina mulai membuka pengeboran gas serta eksplorasi perikanan di sekitar Kepulauan Spratly bagian timur.

Bahkan, kehadiran Filipina di Kepulauan Spratly bagian timur dipertegas dengan mendirikan pos pasukan marinir di sebagian gugus pulau itu. Tumpang tindih pengakuan kedaulatan Kepulauan Spratly oleh Filipina, telah menimbulkan beberapa insiden seperti tahun 1995 ketika Angkatan Laut Filipina membongkar bangunan milik China.

Ketegangan pun berlanjut ketika China merespon sengketa itu dengan mengirim kapal perang ke Kepulauan Spratly. Di lain pihak pasukan militer Filipina menangkapi nelayan China yang beroperasi di sekitar Kepulauan Spratly Timur. Tetapi konflik China-Filipina atas klaim wilayah Kepulauan Spratly tidak segawat antara China dengan Vietnam. Konflik ini untuk sementara dapat diredam lewat jalur diplomatik antar kedua negara.

Belakangan, Malaysia, Taiwan dan Brunei ikut menyatakan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah negara mereka. Malaysia ikut menegaskan bahwa sebagian dari Kepulauan Spratly adalah bagian dari wilayahnya. Malaysia menyebut Kepulauan Spratly dengan nama Terumbu Layang. Menurut Malaysia, langkah ini diambil berdasarkan Peta Landas Kontinen Malaysia Tahun 1979, yang mencakup sebagian dari wilayah Kepulauan Spratly. Malaysia bahkan membangun mercusuar di salah satu wilayah di Kepulauan Spratly. Malaysia yang bersama Filipina dan Brunei merupakan sesama anggota ASEAN, dengan adanya sengketa atas wilayah Kepulauan Spratly khusus untuk Malaysia-Filipina semakin menambah rumit hubungan diantara kedua negara. Hubungan antara Malaysia dengan Filipina yang selama ini agak kurang harmonis karena masalah tenaga kerja, kini masalah semakin kompleks dengan munculnya sengketa klaim wilayah Spratly antara kedua negara.

Taiwan sebagai salah satu negara yang mengakui kedaulatan atas Kepulauan Spratly, juga mengalami ketegangan hubungan dengan Filipina. Klaim atas kepemilikan Kepulauan Spratly memunculkan potensi konflik yang cukup rawan. Taiwan mengklaim dan menduduki Kepulauan Spratly pada tahun 1956 dengan menempatkan pasukannya secara permanen serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya di Pulau Itu Abaa. Di Kepulauan Kalayaan, yang merupakan wilayah gugus Kepulauan Spratly timur mengalami tumpang tindih kepemilikan antara Filipina dan Taiwan. Wilayah yang paling dipertentangkan adalah Pulau Itu Abaa, yang oleh Filipina disebut Pulau Ligaw. Pada tahun 1988 Angkatan Laut China menahan 4 buah kapal nelayan Taiwan yang dituduh telah memasuki wilayah perairan Filipina di Kalayaan. Disamping konflik antara Taiwan-Filipina, konflik juga terjadi antara Taiwan-China mengenai klaim kedaulatan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Konflik Taiwan-China atas Kepulauan Spratly merupakan konflik historis antara kedua negara. Dimana kita tahu pada tahun 1949 telah terjadi perang sipil antara kaum Komunis dan Nasionalis yang

melahirkan dua negara yaitu Republik Rakyat China dan Taiwan. Klaim Taiwan terhadap Kepulauan Spratly sama dengan klaim yang dilakukan China yaitu klaim berdasarkan sejarah masa lalu dari jaman kuno.

Brunei merupakan satu-satunya negara yang tidak mengklaim pulau atau daratan di wilayah Kepulauan Spratly. Brunei hanya mengklaim atas batas kontinen perairan di Laut China Selatan. Brunei ingin ketegasan mengenai masalah tapal batas kontinen perairan negaranya yang meliputi wilayah di sekitar perairan Kepulauan Spratly.

Walaupun demikian tetap saja menimbulkan konflik dengan Malaysia, yaitu sengketa mengenai sebuah karang di sebelah selatan Laut China Selatan yang sewaktu air pasang berada di bawah permukaan laut. Brunei mengakui gugusan karang dan landasan kontinen di sekitarnya merupakan bagian dari wilayahnya.

Di pihak Malaysia pada tahun 1979 mengklaim gugusan karang tersebut bahkan menduduki-nya. Akan tetapi sengketa antara Brunei-Malaysia mengenai klaim kedaulatan di sekitar Kepulauan Spratly relatif tenang, belum sampai menimbulkan konflik terbuka kearah peperangan antar kedua negara. Namun demikian, tetap saja masalah tumpang tindih pengakuan kepemilikan terhadap Kepulauan Spratly sewaktu-waktu bisa meletus kearah konflik terbuka antara Malaysia-Brunei.

Faktor China Menambah Rumit Konflik

Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989, telah mengubah geopolitik kebijakan luar negeri negara-negara di dunia. Bagi negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat, Komunisme bukan ancaman lagi.

Komunisme sekarang merupakan bagian dari sejarah masa lalu. Sekarang yang menjadi ancaman dan tantangan adalah terorisme global serta bagaimana menguasai sumber daya alam dunia dalam rangka mempertahankan hidup. Dunia beserta manusia tidak akan dapat hidup tanpa sumber energi. Energi utama jagad raya adalah matahari sedangkan energi utama manusia adalah minyak bumi.

Semakin menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber daya yang diiringi dengan munculnya perkembangan industri yang begitu pesat di negara-negara berkembang telah menjadi salah satu isu global dunia. Hal ini menimbulkan suatu persaingan antar negara untuk dapat menguasai serta memanfaatkan sumber daya yang ada di beberapa wilayah di dunia, baik itu minyak bumi, gas alam, perikanan maupun sumber air bersih.

Di lain pihak munculnya China sebagai salah satu negara dengan perkembangan ekonomi dan industri yang paling pesat di dunia telah menambah faktor perubahan geopolitik dunia. Amerika Serikat setelah runtuhnya Uni Soviet merupakan negara adi daya satu-satunya di dunia telah melihat perkembangan serta kemajuan ekonomi China sebagai sebuah ancaman baru terhadap hegemoninya atas dunia. Konflik kepemilikan wilayah Kepulauan Spratly di Laut China Selatan tidak terlepas dari persaingan penguasaan atas sumber daya alam dunia. Perkembangan industri dan kemajuan ekonomi serta militer China merupakan faktor utama mengapa penguasaan Kepulauan Spratly begitu penting ditinjau dari sudut Geopolitik. Kepulauan Spratly serta Laut China Selatan secara geografis merupakan wilayah yang sangat strategis.

Bagi China menguasai Kepulauan Spratly dalam arti merupakan bagian dari wilayahnya, merupakan agenda penting karena disamping strategis juga kaya sumber daya serta untuk pertahanan negara guna melindungi kepentingannya di masa yang akan datang. China merupakan negara besar, baik dilihat dari jumlah penduduk maupun luas wilayah sehingga wajar menimbulkan kekhawatiran beberapa negara tetangganya seperti Jepang yang merupakan musuh tradisional China, Korea Selatan, Vietnam, terlebih lagi bagi Amerika Serikat. Mereka menganggap segala sepak terjang China selama ini, dianggap ancaman serius bagi kepentingan negaranya di masa datang.

Sementara itu, khususnya untuk Amerika Serikat, kawasan Laut China Selatan termasuk Kepulauan Spratly merupakan wilayah strategis jalur transportasi laut dunia.

Apabila kawasan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan diklaim oleh salah satu negara yang bukan pro Amerika, apalagi diklaim China itu merupakan ancaman serta pukulan telak bagi Amerika. Bagi Amerika Serikat, dapat mengontrol serta menguasai wilayah perairan di Laut China Selatan merupakan tujuan utama baik ditinjau secara ekonomi maupun militer. Secara ekonomi kawasan ini merupakan jalur utama kapal tanker untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah ke negara Jepang dan Korea Selatan yang merupakan sekutu dekat Amerika, sedangkan secara militer kawasan Laut China Selatan merupakan jalur strategis untuk armada ke VII Amerika di Asia Pasifik untuk bergerak secara cepat dari Pasifik menuju Timur Tengah maupun kawasan lain di dunia apabila diperlukan. Hal ini telah terbukti pada perang Teluk I dan perang Teluk II. Kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berpangkalan di Pasifik bergerak menuju perairan Teluk Persia melalui Laut China Selatan kemudian melewati Selat Malaka atau Selat Lombok terus menuju Timur-Tengah.

Faktor itulah yang menambah mengapa isu klaim atas Kepulauan Spratly begitu rumit dan berlangsung lama. Siapa yang dapat mengontrol kawasan Laut China Selatan, itulah yang akan menguasai perekonomian dunia. Kita tahu sumber-sumber daya alam dunia terletak di Timur Tengah (kawasan Teluk Persia) yang kaya akan minyak bumi, Asia Tengah (kawasan Laut Kaspia) yang merupakan sumber gas alam serta Laut China Selatan yang kaya akan gas alam dan perikanan. Konflik Kepulauan Spratly di Laut China Selatan merupakan persaingan terselubung antara China-Amerika Serikat di Asia Pasifik. China sebagai kekuatan ekonomi baru dunia ingin menamparkan diri kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik, bahwa China kini patut di perhitungkan, sedangkan di mata Amerika Serikat, kemajuan ekonomi serta perkembangan militer China akhir-akhir ini merupakan ancaman bagi Amerika dan sekutunya khususnya Jepang dan Korea Selatan. Amerika wajar khawatir karena China mempunyai semua potensi untuk menjadi negara adi daya baru dunia untuk menyaingi Amerika Serikat. Bahkan para pakar ekonomi

meramalkam bahwa kira-kira tahun 2050 pertumbuhan ekonomi China akan mengungguli pertumbuhan ekonomi Amerika.

Penutup

Konflik klaim wilayah atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan merupakan konflik unilateral yang melibatkan enam negara yaitu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina. Empat dari enam negara tersebut yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina adalah anggota ASEAN. Berdasarkan Hukum Laut Internasional, negara-negara yang berkepulauan berhak untuk merawat daerah-daerah di belakang garis-garis dasar, seakan-akan mereka merupakan daratan atau perairan internal atau miliknya. Negara-negara tersebut juga berhak untuk menekankan segala pengklaiman arah laut dari garis dasar kepulauan mereka. Namun demikian melakukan klaim tersebut ternyata membawa dampak ketegangan tentang batas-batas wilayah. Sementara proses penyelesaian mengenai batas-batas perairan akan memakan waktu lama oleh karena perbedaan prinsip dan kepentingan masing-masing pihak. Untuk itu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei serta Filipina perlu mengadakan suatu kesepakatan berdasarkan pada hukum internasional guna mencapai solusi yang adil untuk enam negara tersebut.

Konflik saling klaim wilayah antara keenam negara tersebut, memang suatu permasalahan yang rumit untuk dapat diselesaikan dengan segera. Apalagi masing-masing negara merasa memiliki kepentingan dan hanya mengedepankan kepentingannya negaranya sendiri. Konflik seperti Kepulauan Spratly ini akan bisa selesai dengan baik bila masing-masing negara mengedepankan kepentingan bersama dan saling menghargai masing-masing kedaulatan yang dimilikinya. Apalagi modal kearah tersebut sudah cukup mendukung, karena Vietnam, Malaysia, Brunei serta Filipina merupakan negara anggota ASEAN sehingga dapat bersatu didalam menghadapi sengketa wilayah ini, terutama untuk menghadapi kekuatan China dalam misi diplomatik. Selama ini negara yang paling gencar untuk mengklaim Kepulauan Spratly adalah China.

Oleh karena itu untuk mendapatkan keuntungan bersama, tidak saling merugikan serta menghormati tata cara pergaulan bangsa-bangsa di dunia sesuai dengan asas-asas

Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada lima pilihan solusi yang bisa ditempuh, yaitu :

Pertama, Keenam negara yang melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly yaitu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina perlu duduk bersama dalam meja perundingan untuk membicarakan penyelesaian konflik batas-batas wilayah perairan dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti gas dan perikanan yang ada di kawasan Kepulauan Spratly dan sekitarnya.

Kedua, Mengadakan kerjasama seperti melakukan eksplorasi sumber daya gas serta kerjasama dalam bidang perikanan yang saling menguntungkan dalam memanfaatkan kekayaan yang tersimpan di Kepulauan Spratly, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Ketiga, Kerjasama dalam bidang keamanan dalam rangka menjaga keamanan kawasan regional Asia-Pasifik yang melibatkan seluruh negara di kawasan ini sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

Keempat, Khusus untuk Vietnam, Malaysia, Brunei serta Filipina yang merupakan anggota ASEAN, agar menempuh kebijakan sesuai dengan kesepakatan ASEAN, dimana segala bentuk sengketa wilayah antar negara ASEAN diselesaikan lewat perundingan diplomatik yang bermartabat saling menghormati dan tidak menyelesaikan konflik dengan perang.

Kelima, Bila kesepakatan tersebut diatas belum tercapai, satu-satunya jalan menyerahkan konflik tersebut kepada Mahkamah Internasional, sehingga apapun keputusan Mahkamah Internasional harus diterima oleh keenam negara yang bersengketa.

Apabila keenam negara yaitu China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina berkeinginan untuk segera menyelesaikan konflik saling klaim kepemilikan atas wilayah Kepulauan Spratly, serta pemanfaatan kekayaannya, maka kelima solusi tersebut harus di kedepankan, sehingga tidak menimbulkan ketegangan berkepanjangan antar keenam negara tersebut yang bisa mengganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik.

Mayor Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc. adalah abituren Sepa PK 2000 dan Dikreg LX Seskoad. Saat ini menjabat, Danden harjasaint I-44-12



MEMBANGUN MASA DEPAN PAPUA DALAM BINGKAI NKRI

Mayor Arm Nicolau P. Da Silva, S.E., M.I.Pol.

Latar Belakang.

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 16 Mei 1895 terjadi kesepakatan penguasaan wilayah Irian Jaya/Papua antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Belanda, yang menyebutkan bahwa Bangsa Inggris menguasai wilayah Papua sebelah timur dan Bangsa Belanda menguasai Papua sebelah barat. Kemudian pada tahun 1898 Belanda membagi Papua menjadi dua wilayah administratif yakni Papua Utara dan Papua Selatan dengan maksud untuk memudahkan pengendalian dan perdagangan pada masa itu.

Setelah kemerdekaan RI tahun 1945 sampai pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 Pemerintah Belanda belum menyerahkan Irian Jaya/Papua kepada Pemerintah RI dan berjanji akan dibicarakan satu tahun kemudian, namun berjalanannya waktu Belanda mengingkari janjinya tentang pembahasan Irian Jaya, padahal sesuai dengan konsep hukum internasional yaitu uti posideti juris (berlaku ketentuan bahwa suatu negara mewarisi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh negara penjajahnya), namun Pemerintah Belanda mengesampingkan hal itu dan menyatakan bahwa etnis yang ada di Papua berbeda dengan etnis yang ada di wilayah Indonesia dan menginginkan Papua menjadi bagian dari Belanda yang diberi nama Nieuw Guinea.

Melihat itikad Belanda yang tidak baik tersebut akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Kota Yogyakarta, memutuskan dibentuknya TRIKORA guna melaksanakan konfrontasi dengan pihak Belanda.

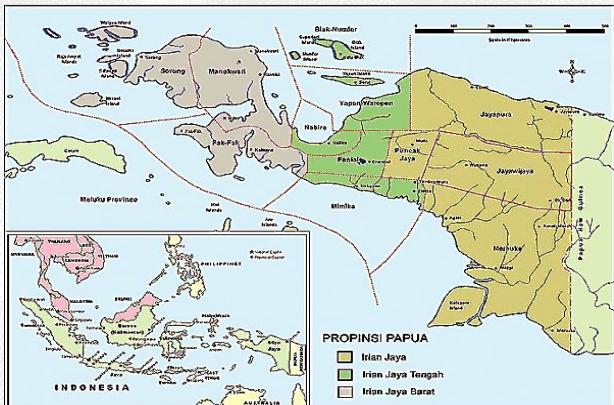
Melalui perjuangan fisik tersebut akhirnya DK PBB melalui AS memutuskan untuk mempertemukan delegasi Pemerintah RI dan Belanda yang dikenal dengan perjanjian New York untuk membahas masa depan Papua. Dalam pertemuan tersebut disepakati Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA (*United Nation Temporary Executive Administration*) dan salah satu poin dalam perjanjian tersebut untuk memastikan apakah warga Papua benar-benar ingin menjadi bagian dari NKRI atau tidak maka pada tahun 1969 dilaksanakan PAPER, hasil dari PAPER tersebut warga Papua dengan tegas ingin menjadi bagian dari NKRI.

Walaupun sampai saat ini Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau sekarang disebut dengan kelompok teroris dan simpatisannya yang memiliki perbedaan pandangan tentang NKRI masih berupaya untuk menciptakan situasi di Papua agar tidak aman dengan melakukan pembunuhan, pemerrosaan, pembakaran dan kegiatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.

Namun, hal ini tidak sepenuhnya menjadi hambatan bagi pemerintah pusat untuk tetap melaksanakan pembangunan terutama pada aspek sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur, serta menjadikan Orang Asli Papua (OAP) menjadi tuan di tanahnya, diberikan kepercayaan untuk memimpin dan membangun wilayahnya secara komprehensif, utuh dan bermartabat dalam bingkai NKRI. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana membangun masa depan Papua dari aspek sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur? Penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, kepustakaan dan referensi lainnya yang terkait dengan judul.

Pembahasan.

a. Umum. Sebagian orang, baik dari luar negeri maupun dalam negeri mengatakan bahwa tanah Papua merupakan tanah yang subur penuh dengan kekayaan alam yang mengandung sumber daya mineral logam seperti tembaga, emas, dan perak. Di sisi lain, provinsi berjuluk "Bumi Cenderawasih" ini juga memiliki kondisi alamnya yang eksotik dan memiliki nilai seni yang tinggi serta merupakan salah satu pulau yang terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 421.981 km² (3,5 kali lebih besar dari pada Pulau Jawa) dengan topografi yang meliputi daerah pegunungan dan sebagian besar tanah yang berawa-rawa di daerah pesisir serta memiliki total penduduk sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua merilis bahwa data jumlah penduduk Bumi Cenderawasih sebanyak 3,4 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020.



Peta Wilayah Papua

Kekayaan alam yang dimiliki Papua tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai sehingga harus dinikmati oleh OAP secara optimal.

Namun, kenyataannya belum semua OAP merasakan kekayaan alamnya, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa salah satu provinsi paling miskin di Indonesia adalah Papua yang masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Data tersebut sangat ironis apabila dihadapkan dengan tanah Papua yang kaya, tetapi rakyatnya masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga wajar apabila masyarakat Papua minta kepada pemerintah pusat untuk diperhatikan dan diberlakukan adil khususnya dari segi ekonomi karena menurut pandangan mereka bahwa dalam aktivitas ekonomi kehidupan sehari-hari seperti di pasar tradisional saja mereka masih merasakan belum diperhatikan, dimana dapat dilihat bahwa lebih banyak OAP (mama-mama) berjualan di emperan sedangkan pendatang berjualan di dalam kios-kios yang ada di dalam pasar. Disamping itu masyarakat Papua juga menginginkan kekayaan yang dimiliki di atas tanahnya dapat dieksplorasi secara optimal dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Papua dan sebagian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, Puskemas dan gedung sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pada kesempatan yang lain OAP juga masih merasakan adanya diskriminasi yang terjadi di beberapa wilayah yang menurut mereka merupakan suatu tindakan yang sangat tidak menyenangkan seperti halnya yang disampaikan oleh aktivis kemanusiaan Papua, juga mantan tahanan politik anti rasisme, Ambrosius Mulait, yang juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), yang menyatakan bahwa dugaan ucapan rasisme yang dilakukan tokoh-tokoh nasional itu merupakan kejadian pidana karena dimulai dari suatu niat (berbasis prasangka ras) yang melukai perasaan orang Papua.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu intelektual muda yang bernama Otis Tabuni, mengatakan bahwa tindakan rasisme terhadap sekelompok mahasiswa Papua di

Surabaya, telah mengganggu harkat warga Papua secara umum. Persoalan rasisme yang terjadi itu merupakan gangguan terhadap harkat. Kalau bicara harkat maka di situ ada martabat. Kalau bicara martabat maka di situ ada nilai. Kalau bicara soal nilai maka di situ ada kedudukan. Oleh sebab itu, bagi saya, persoalan rasisme di Surabaya merupakan gangguan terhadap harkat dan martabat manusia Papua.



Sejumlah mahasiswa asal Papua melakukan unjukrasa di Jalan Kusumanegara, DI Yogyakarta, Selasa (20/8/2019). Antara foto

Selain itu masih ada oknum anak bangsa yang melakukan tindakan yang tidak tepat dan terpuji, yang dialamatkan kepada salah satu tokoh Papua yaitu Natalis Pigai yang beberapa waktu lalu menjadi topik pembicaraan, yang hangat dibicarakan oleh pengamat maupun masyarakat luas yang menilai bahwa tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan bersifat rasis, yang memerlukan penanganan sesuai dengan hukum yang berlaku di republik ini. Tindakan seperti ini harus dihindari sebagai sesama warga negara guna membangun masa depan Papua yang lebih baik, bagi individu di mana pun berada dan apa pun profesiya diharapkan membangun rasa kepercayaan diri bagi warga Papua bahwa mereka adalah bagian integral dari NKRI, karena saat ini sebagian kecil OAP jiwa nasionalismenya mulai tergerus akibat dari pernyataan ataupun tindakan dari oknum WNI yang sangat tidak bersahabat dan mempengaruhi kepercayaan OAP.

Dari kedua pernyataan di atas dapat memberikan pandangan bahwa sebenarnya warga Papua menginginkan adanya perhatian dari pemerintah agar adanya persamaan derajat / kedudukan dalam melaksanakan

aktivitasnya serta menginginkan pengakuan dari saudara-saudaranya yang ada di wilayah lain untuk tidak memberikan stigma bagi OAP karena akan menambah dendam, membuka luka lama dan berdampak langsung kepada pemikiran yang tidak baik tentang NKRI karena merasa dihina dan tidak dihargai sebagai sesama anak bangsa dalam bingkai NKRI.

b. Membangun masa depan Papua dari aspek sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur. Berbicara tentang masa depan Papua dalam bingkai NKRI merupakan hal yang mutlak dan harus serta tidak bisa ditawar karena sejak masyarakat Papua menyatakan keinginannya mau bergabung dengan NKRI maka saat itu juga secara sah menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu pemerintah memiliki tanggungjawab untuk membangun wilayah Papua dari segala aspek terutama dari aspek sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur.

Pertama. Upaya yang dilakukan dalam membangun aspek sumber daya manusia di wilayah Papua yaitu pemerintah membuka ruang dialog dengan pemerhati pendidikan baik dari pusat maupun yang ada di daerah, tokoh agama, dan guru untuk mencari formulasi kurikulum pendidikan yang tepat, disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi psikologi yang dimiliki oleh para siswa sehingga para guru yang akan melaksanakan tugas mengajar dapat mudah menerapkan metode belajar yang tepat bagi siswanya guna meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini perlu disiapkan secara baik dengan membentuk tim pengawasan dan evaluasi untuk melaksanakan tugasnya setiap semester per tahun guna mengetahui apakah ada hambatan ataupun perkembangan yang dialami oleh siswa dari metode pengajaran yang telah dirumuskan tersebut oleh tim agar hasil yang dicapai memenuhi target yang ditetapkan.

Disamping itu melaksanakan pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dengan memberikan sekolah gratis bagi masyarakat Papua sehingga mereka dapat menyekolahkan putra-putrinya (mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Universitas) secara leluasa di

seluruh sekolah yang ada di Papua dan bagi wilayah yang masih terjadi gangguan keamanan dapat mengirimkan putra/putrinya untuk diasramakan di tempat yang aman agar mereka dapat belajar dengan tenang, untuk kurikulum pendidikan dan materi pelajaran dapat mengadopsi 50 persen mengikuti kurikulum dari pusat dan 50 persen diserahkan kepada daerah untuk memilih dan menentukan sendiri materi apa saja yang cocok untuk diajarkan. Namun, khusus untuk perguruan tinggi perlu adanya pembahasan lebih lanjut antar pemerintah daerah dan instansi terkait khususnya kementerian/ departemen pendidikan disesuaikan dengan standar nasional ataupun internasional agar putra-putri yang melaksanakan perkuliahan tidak ketinggalan dengan saudara-saudaranya yang kuliah di luar Papua.

Sejak dulu memberikan pendidikan tentang pemahaman sejarah yang benar kepada generasi muda bahwa sejak dulu Papua telah menjadi bagian dari Nusantara yaitu pada masa Kerajaan Majapahit maupun Kesultanan Tidore. Hal ini penting diajarkan agar membuka cara pandang dan perlahan dapat mengikis doktrin yang keliru di benak masyarakat Papua tentang Indonesia dan bagi setiap orang yang bekerja di tanah Papua apa pun profesi, khususnya aparat keamanan diimbau untuk melaksanakan tugas dengan pendekatan hati untuk dapat merangkul semua tokoh baik yang pro maupun kontra terhadap NKRI yang ada di Papua diajak berdiskusi didengar pendapatnya, dan merumuskan jalan keluar yang tepat bagi masyarakat Papua untuk dapat menata masa depan yang lebih baik serta melupakan masa lalu dalam bingkai NKRI.

Hal ini akan tercapai apabila dilaksanakan dengan kemauan, kerja keras dan ikhlas serta didukung oleh seluruh WNI yang saat ini berada di Papua (baik pebisnis, Aparat Sipil Negara maupun TNI/Polri tanpa pandang asalnya darimana) maupun WNI yang ada di daerah lain untuk mendukung komitmen ini agar tidak lagi memunculkan perkataan maupun tindakan yang bersifat rasis, yang selama ini dirasakan oleh OAP untuk menunjukkan kepada masyarakat Papua

bahwa seluruh bangsa Indonesia yang berada di Papua berkomitmen untuk membangun tanah Papua sejarah dengan daerah lain dan menjaga keamanan sampai pelosok-pelosok agar tercipta kedamaian serta untuk penegakan hukum selalu melibatkan pemerintah daerah setempat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

Kedua. Upaya yang dilakukan dalam membangun sosial budaya di wilayah Papua, ialah pemerintah harus memberikan kepercayaan seluas-luasnya dan mengangkat status sosial OAP untuk menjadi tuan di atas tanahnya (lebih banyak menjadikan OAP menduduki jabatan di pemerintahan maupun lembaga strategis lainnya). Melestarikan kearifan lokal merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh setiap orang yang ada di tanah Papua, mendukung dan melestarikan nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas diupayakan memperhatikan kearifan lokal dan senantiasa lebih banyak melakukan tindakan nyata yang langsung dirasakan/dinikmati masyarakat daripada memberikan instruksi atau yang sifatnya menggurui. Karena untuk menemukan jalan penyelesaian yang permanen, dibutuhkan sebuah strategi sosial budaya yang komprehensif dan tentunya memiliki strategi yang baik untuk mampu menjaga dan memperkuat kepribadian dalam kesatuan bingkai NKRI yang diawali dari setiap daerah yang ada di Papua, dengan menciptakan keharmonisan dan integrasi dari berbagai komunitas masyarakat yang ada di tanah Papua untuk menjalin kerja sama dan hidup berdampingan secara terus-menerus diupayakan dan diperjuangkan agar persoalan sosial budaya yang selama ini terjadi di daerah tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik dengan memberdayakan perangkat yang ada seperti Dewan Adat Papua maupun Majelis Rakyat Papua yang memiliki peran dan fungsi sesuai dengan otonomi daerah.

Ketiga. Upaya yang dilakukan dalam membangun ekonomi di wilayah Papua, salah satunya adalah mengoptimalkan dana otonomi khusus untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dengan cara memberikan

modal usaha kepada masyarakat kecil Papua, tetapi sebelumnya diberikan pemahaman yang mudah dicerna dan dapat diaplikasikan melalui penataran ataupun Diklat tentang bagaimana cara usaha yang benar. Masyarakat yang menerima dana tersebut dapat dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan bidang usaha sehingga memudahkan pembinaan karena perlu adanya tim pendamping yang bertugas dalam melaksanakan evaluasi dan memberikan arahan yang tepat demi kemajuan usaha yang digeluti. Disamping itu para pendamping memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil yang dicapai setiap 6 bulan atau setiap tahun terhadap kelompoknya maupun secara perorangan serta kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

Sedangkan biaya hidup yang masih dirasakan mahal, pemerintah diminta untuk menstabilkan harga dengan cara memotong jalur distribusi yang panjang atau langsung melaksanakan operasi pasar yang dapat dilakukan setiap sebulan sekali sebagai solusi yang tepat karena di beberapa distrik masih terjadi perbedaan harga yang menyolok seperti kebutuhan pokok antara daerah yang satu dengan daerah yang lain di tanah Papua. Disamping itu pemerintah daerah disarankan untuk memonitor usaha mikro yang dikelola oleh OAP secara berkesinambungan agar pendampingan yang telah dilaksanakan jangan sampai terputus di tengah jalan akibat rotasi/perpindahan di antara pendamping serta membangkitkan semangat untuk mengelola usaha dengan baik dan profesional.

Keempat. Upaya yang dilakukan dalam membangun infrastruktur di wilayah Papua adalah mengoptimalkan pembangunan yang saat ini ada khususnya jalan raya dan jembatan, perlahan sudah ada perubahan dibandingkan tahun-tahun yang lalu namun masih perlu ditingkatkan, sedangkan untuk gedung sekolah, asrama dan Puskemas perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk membuka akses jalan antar daerah yang satu dengan yang lain karena akan memotong biaya produksi penyaluran bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah harus di koordinasikan dan melibatkan semua unsur yang ada di tanah Papua sehingga meminimalisir

kecurigaan dari pihak yang tidak ikut serta dalam rancang bangun di tanah Papua.

Mengusahakan agar semua pembangunan yang akan dilaksanakan di tanah Papua harus diketahui oleh semua pihak yang ada, dengan maksud agar para pihak ini mensosialisasikan kepada lapisan masyarakat sesuai dengan fungsi ataupun jalur masing-masing agar mendapat dukungan secara penuh dari masyarakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan ini dalam rangka memajukan tanah Papua sehingga sebagai OAP harus dan wajib mendukung bukan sebaliknya menjadi penghambat pembangunan. Tentunya ini semua dilakukan dengan membutuhkan tenaga dan pikiran untuk itu diupayakan mulai dari merancang, pengawas sampai dengan pembangunan harus mengikutsertakan OAP untuk ambil bagian dalam organisasi yang disusun tersebut, sehingga secara tidak langsung harkat dan martabat serta kedudukan sosial OAP di angkat sesuai dengan keahlian maupun tugas dan fungsinya.

Penutup.

Sebagai WNI kita patut prihatin atas setiap peristiwa yang terjadi di tanah Papua bahwa sejak bergabung dengan NKRI tahun 1969 sampai saat ini masih ada sebagian saudara-saudara kita di Papua yang belum menerima NKRI sebagai bangsanya dan melakukan kegiatan melawan hukum. Menghadapi mereka perlu adanya tindakan yang nyata melalui peningkatan di bidang sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kepada mereka bahwa pemerintah RI dari awal tetap konsisten dan berlanjut membangun tanah Papua secara menyeluruh agar Papua sejajar dengan Provinsi lain dan diperlukan adanya komunikasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat baik yang pro maupun kontra terhadap NKRI, diajak, dirangkul dan didengar pendapatnya dalam bingkai NKRI selanjutnya dirumuskan dan ditindaklajuti hasil dari kesepakatan tersebut.

Mayor Arm Nicolau P. Da Silva, S.E., M.I.Pol. Abituren Semapa Pk 2000. Saat ini menjabat sebagai Irdawasvermat Itutben Inspektorat Seskoad



KAPASITAS PERSONEL TNI DALAM DETEKSI DINI TERORISME

Major Ctp Yovi Tridat, S.Kom

Pendahuluan

Terorisme menjadi ancaman nyata terhadap keamanan bangsa Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari kejadian terorisme global dan tatanan politik global. Selain itu, keadaan ideologi, politik dan ekonomi dalam negeri juga ikut memicu terjadinya aksi terorisme. Dalam konteks tersebut, ancaman terorisme di Indonesia bisa mengganggu keamanan nasional, regional, dan internasional. Mencuatnya permasalahan teror di Indonesia dipicu oleh adanya derap reformasi yang membawa berbagai akibat dan ekses negatif dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berbagai konflik horizontal maupun vertikal mulai bermunculan bernaaskan kepentingan politik dari kelompok-kelompok tertentu. Sehingga dari kondisi konflik politik dan konflik horizontal tersebut memancing kelompok-kelompok tertentu untuk memanfaatkan situasi "memancing di air keruh" dengan melancarkan berbagai aksi teror seperti peledakan bom, penculikan, pembunuhan, ancaman melalui pesawat telepon, dan lain-lain. Aksi terorisme sangat berbahaya karena disamping bertabrakan dengan peradaban manusia juga dapat membentuk manusia ultra-ekstrim dan ultra-fanatik, dimana ideologi teror mampu mengubah manusia menjadi monster yang siap melakukan apa

saja yang diperintahkan oleh pimpinannya dengan cara apa pun.

Tugas pokok TNI sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : Operasi militer untuk perang dan Operasi militer selain perang. Salah satu tugas pokok dalam operasi militer selain perang yaitu mengatasi aksi terorisme.

Dihadapkan dengan ancaman nyata terorisme serta kompleksitas tugas TNI yang semakin beranekaragam, maka menjaga kapasitas prajurit TNI agar mampu menjawab segala bentuk tantangan tugas kedepan adalah sangat penting. TNI melaksanakan fungsi intelijen berdasarkan kegiatan intelijen yang salah satu tugasnya adalah pengumpulan informasi dan data untuk diolah dan dilaporkan ke komando atas dalam rangka

melaksanakan pencegahan dini terhadap ancaman yang mungkin timbul. Ancaman yang sangat nyata saat ini sebagaimana diuraikan di atas adalah ancaman terorisme, ancaman tersebut semakin massif dengan adanya isu jaringan ISIS yang menyebarkan pengaruhnya ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, fungsi intelijen tersebut harus berjalan secara tepat dan benar agar pelaksanaan deteksi dini berjalan secara optimal.

Aparat intelijen TNI merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan penggalangan informasi dilapangan. Dengan kapasitas yang baik, aparat intelijen TNI mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Kapasitas aparat intelijen TNI merupakan kunci dalam melaksanakan deteksi dini terorisme di wilayah, sebagaimana dijelaskan Milen bahwa kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan, kemampuan/kapasitas individu menurut Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS adalah ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Kapasitas aparat intelijen TNI dikaitkan dengan tugas, dapat diartikan sebagai keterampilan mencakup kecakapan yang dimiliki oleh aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme di wilayah dan pengetahuan yang mencakup pemahaman, penguasaan ilmu dan ketentuan dalam deteksi dini di wilayah dan tingkah laku yang berkaitan dengan pola, sikap dan laku aparat intelijen TNI dalam deteksi dini di wilayah serta motivasi yang berkaitan dengan keinginan/dorongan dari diri sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan maupun semangat dalam melaksanakan pekerjaan dalam deteksi dini terorisme di wilayah. Selain itu, aparat intelijen TNI mampu melaksanakan tugas secara berkelompok, sehingga deteksi dini terorisme di wilayah dapat terlaksana secara cepat dan akurat.

Pembinaan keterampilan dan pengetahuan sudah dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus di satuan TNI, sehingga kapasitas individu aparat intelijen TNI dapat terjaga secara optimal. Selain itu, pembinaan mental dan disiplin aparat intelijen TNI-pun sudah dilaksanakan dengan memberikan *reward and punishment* maupun jam komandan dan pendekatan persuasif terhadap individu untuk meningkatkan motivasi diri dalam melaksanakan pekerjaan di satuan maupun di lapangan. Dengan kondisi kapasitas yang dimiliki aparat intelijen TNI mampu melaksanakan deteksi dini terorisme di wilayah secara cepat dan tepat. Namun, dihadapkan dengan kapasitas aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme di wilayah belum tercapai secara optimal.

Pembahasan.

Pengetahuan dan keterampilan aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme.

Sebagaimana uraian Soeprapto, bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari kapasitas individual. Pentingnya pengetahuan aparat intelijen TNI yang berkaitan dengan deteksi dini terorisme, akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Notoatmodjo (2011), menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil tahu setelah aparat intelijen TNI melakukan penginderaan suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra yaitu indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra rasa, dan indra raba.

Pengetahuan aparat intelijen TNI berkenaan dengan deteksi dini terorisme di wilayah didapat dari penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan dan indera raba yang diaplikasikan pada saat pelaksanaan tugas di lapangan. Apapun yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh personel, akan memberikan tambahan pengetahuan yang diarahkan pada pengetahuan deteksi dini terorisme. Pengetahuan aparat intelijen TNI dapat dilihat dari beberapa faktor. Notoatmodjo (2007) dan Budiman (2013) memberikan beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan individual aparat intelijen TNI, antara lain : faktor pendidikan, faktor media massa, faktor sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman dan faktor usia.

Faktor-faktor tersebut, akan mempengaruhi pengetahuan aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme di wilayah. **Pendidikan** diartikan sebagai sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku aparat intelijen TNI melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan mempengaruhi proses kerja, makin tinggi pendidikan aparat intelijen TNI makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan satuan TNI diarahkan pada bentuk ancaman dan tantangan secara umum berkaitan dengan Ipoleskosbud Hankam. Sehingga kurikulum mengenai bentuk ancaman dan tantangan secara spesifik mengenai terorisme belum ada.

Motivasi dan pengelompokan kerja aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme di wilayah.

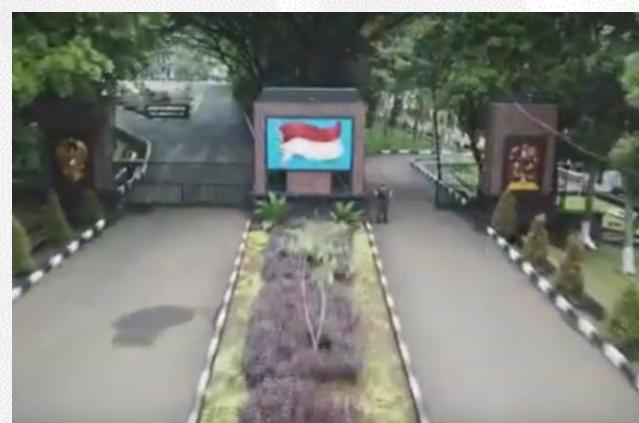
Selain pengetahuan dan keterampilan, Soeprapto berpendapat bahwa motivasi dan pengelompokan kerja merupakan suatu kapasitas individual. Motivasi bagi aparat intelijen TNI merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Motivasi berdasarkan jenisnya dibagi kedalam empat (4) jenis, dimana Biggs dan Telfer dalam Sugihartono, dkk (2007: 78) menjelaskan jenis-jenis motivasi tersebut antara lain : Pertama, Motivasi instrumental. Motivasi Instrumental merupakan dorongan yang membuat karyawan karena ingin mendapatkan hadiah. Motivasi aparat intelijen TNI didasari pada pencapaian reward (hadiah), tidak dapat dipungkiri masih ada, walaupun tidak secara gamblang menunjukkan keinginannya. Terkait dengan motivasi ini, kembali pada sifat dasar manusia tersebut, apakah melaksanakan pekerjaan didasari pada motivasi instrumental atau bukan. Kedua, Motivasi sosial. Motivasi sosial merupakan motivasi yang menjadikan karyawan lebih terlibat dalam tugas. Aparat intelijen TNI, senantiasa memiliki keterlibatan aktif dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Jenis motivasi selanjutnya adalah motivasi berprestasi. Karyawan bekerja untuk meraih

keberhasilan yang telah ditentukan. Kenaikan pangkat atau jabatan merupakan contoh dari motivasi berprestasi ini. Kebutuhan manusia adalah untuk dihargai dan dikenal oleh orang, sehingga setiap individu memiliki perasaan tersebut dan berkeinginan untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Aparat intelijen TNI memiliki hirarki yang jelas sebagaimana organisasi TNI pada umumnya, didalamnya terdapat unsur pimpinan, staf pembantu pimpinan sampai dengan anggota/bawahan. Aparat intelijen TNI akan senantiasa memiliki motivasi berprestasi dari bawahan menjadi atasan, Keempat. Motivasi instrinsik, memiliki rasa ingin kerja dengan keinginannya sendiri karena mendapatkan dorongan dari dalam diri. Karyawan yang memiliki motivasi ini, akan senantiasa melakukan pekerjaan secara ikhlas dan tidak meminta imbalan apapun. Walaupun pada akhirnya mendapatkan reward dari atasan, bawahan ini tidak akan berubah dan terus melakukan pekerjaan secara optimal.

Upaya peningkatan kapasitas aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme di wilayah.

Satuan TNI dihadapkan pada upaya peningkatan kapasitas aparat intelijen TNI melakukan berbagai upaya agar aparat intelijen TNI mampu melaksanakan tugas satuan termasuk dalam deteksi dini terorisme diwilayah. Dikaitkan dengan pokok permasalahan, upaya yang dilakukan meliputi Pengetahuan. Sebagaimana disampaikan diatas, peningkatan pengetahuan aparat intelijen TNI dilaksanakan melalui pelaksanaan pendidikan berupa pendidikan formal, non formal, kursus dan seminar.



Gapura menuju Pusat Pendidikan Latihan Intelijen Kodiklat TNI AD di Kota Bogor Jawa Barat

Upaya peningkatan pengetahuan menurut Notoatmodjo (2011), dilakukan agar aparat intelijen TNI memiliki rasa tahu untuk melakukan penginderaan yang mencakup indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra rasa, dan indra raba dalam melaksanakan penugasan.

Satuan TNI memiliki sekolah *Postic Clandestine Intelijen (PCI)*, yaitu sekolah yang dikhususkan untuk pembentukan jaring. Sekolah ini diarahkan agar aparat intelijen TNI memiliki intuisi/naluri untuk membuat jaring intelijen.



Lahan anti terror oleh Prajurit TNI AD

Selain itu, TNI memiliki sekolah penggalangan dan sekolah *Contra* untuk melihat kemampuan musuh/lawan. Sekolah-sekolah tersebut dilaksanakan agar aparat intelijen TNI memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk melaksanakan penugasan. Selain itu, saran dari para unsur Komandan yang ada di TNI, agar para aparat intelijen TNI rajin membaca segala informasi yang ada di surat kabar atau informasi yang didapat dari media massa konvensional maupun dari internet dan aplikasi di *smartphone*. Arah dari saran ini, agar aparat intelijen TNI mampu membaca situasi kondisi saat ini dengan terus meng-update informasi yang berkembang. Selain itu, keberadaan *e-library* berkaitan dengan pengetahuan umumpun dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan aparat intelijen TNI.

Perkembangan teknologi saat ini, menuntut untuk memahami segala bahasa untuk berkomunikasi dan membaca literatur berbahasa asing terutama bahasa Inggris. Oleh sebab itu, perlunya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris agar mampu menampung segala informasi yang lebih luas dari luar negeri.

Dihadapkan pada upaya yang telah dilakukan oleh TNI dalam meningkatkan pengetahuan, penulis berpendapat perlunya pemanfaatan media massa dan cyber agar pengetahuan semakin luas terkait dengan pengetahuan intelijen.

Upaya yang kedua mengenai Keterampilan. Upaya satuan untuk meningkatkan keterampilan dilaksanakan melalui pembinaan latihan secara rutin dan terus-menerus. Upaya ini dilakukan agar personel menjadi terampil, yaitu sebagai suatu perbuatan atau tugas, dan sebagai indikator dari suatu tingkat kemahiran. Alat Matsus intelijen TNI merupakan alat yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas aparat intelijen TNI di lapangan, agar terlaksana secara cepat dan tepat.

Upaya meningkatkan keterampilan alat Matsus intel dilakukan melalui pembekalan Matsus Intel. Matsus saat ini sudah menggunakan I.T, sehingga perlu adanya pelatihan I.T mulai dari tahap dasar sampai dengan *excellent*.



Penyematan brevet anti-teror dari Satuan 81 (Sat-81) Kopasus TNI AD

Selain itu, agar personal intelijen memiliki intuisi/naluri, perlu diberikan penugasan secara kontinyu agar intuisi/naluri intelijennya terasah dan semakin tajam.

Merujuk pada upaya peningkatan keterampilan di atas, penulis berpendapat perlunya pembekalan, pelatihan, kursus maupun pemberian penugasan secara rutin agar intuisi/naluri setiap aparat intelijen TNI dapat muncul dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok di lapangan.

Upaya ketiga berkaitan dengan Motivasi. Untuk menjaga kondisi psikologis prajurit, maka perlu upaya peningkatan motivasi agar semangat prajurit terjaga secara baik dalam melaksanakan penugasan baik di lapangan maupun di satuan.

Mc Donald dalam Sardiman, A.M (2007), mengartikan motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "feeling" dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu energi dalam diri prajurit yang terus dijaga agar munculnya "good feeling" dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan motivasi dilakukan melalui pemberian reward berupa penghargaan, materi maupun apresiasi dari unsur pimpinan dan satuan agar para personel memiliki sence of belonging yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat peran serta para Komandan dalam menjaga motivasi aparat intelijen TNI sangat penting, sehingga perlu ditingkatkan melalui pemberian reward and punishment.

Sedangkan upaya yang terakhir berkaitan dengan Pengelompokan kerja. Pengelompokan kerja di TNI sudah dilaksanakan dengan adanya bagian-bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Kelompok kerja/tim menurut Hare (1992 dalam Burn, 2004) menyebutkan kelompok kerja (work groups) merupakan beberapa individu yang memandang diri mereka, dan dipandang oleh lingkungan kerjanya, sebagai sebuah kesatuan sosial, yang saling ketergantungan karena tugas yang mereka kerjakan sebagai anggota kelompok yang terikat dalam satu atau lebih organisasi.

Penutup.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan keterampilan aparat intelijen TNI dalam deteksi dini harus terus ditingkatkan, seiring dengan ancaman terorisme yang terus berkembang. Pengetahuan aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme dirasa masih kurang dan belum didukung dengan adanya kurikulum terkait radikalisasi dan deradikalisasi yang mengarah pada terorisme. Demikian juga keterampilan aparat intelijen TNI dalam mengelola dan membina jaring intelijen perlu terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan deteksi dini dapat dilakukan secara optimal.

Motivasi dan Pengelompokan kerja aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme. Motivasi aparat intelijen TNI sudah cukup baik dengan adanya dorongan semangat yang diberikan oleh unsur pimpinan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas. Sedangkan pengelompokan kerja mulai dari masuk ke satuan TNI, setiap personel dipisah-pisahkan berdasarkan kemampuan dan pembinaannya, namun secara spesifik pengelompokan personel untuk melaksanakan deteksi dini terorisme di wilayah belum ada.

Kapasitas aparat intelijen TNI dalam deteksi dini terorisme di wilayah perlu terus ditingkatkan, ada beberapa saran agar kapasitas aparat intelijen TNI dapat terjaga dan terus meningkat, antara lain Pimpinan perlu membuat kurikulum radikalisme dan deradikalisme, agar mampu meningkatkan pengetahuan prajurit TNI AD dihadapkan pada ancaman dan tantangan di masa depan terkait dengan gerakan radikalisme dan terorisme.

Demikian esai ini dibuat tentang analisis kapasitas aparat intelijen TNI dalam rangka deteksi dini terorisme di wilayah.

Mayor Ctp Yovi Tridat, S.Kom. adalah abituren PK 2004 dan lulusan Seskoad Dikreg LX 2021, Saat ini menjabat sebagai Kabagdiknistro Subditbinbantop Dittopad



PENGARUH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PUTUSNYA HUBUNGAN DIPLOMATIK NEGARA VENEZUELA DAN NEGARA KOLOMBIA

Major Cba I.K.Arsana Putra, S.T., M.Sc.

Pendahuluan

Venezuela merupakan negara di Amerika Selatan yang memiliki GDP (*Gross Domestik Product*) paling besar. GDP tersebut bersumber dari hasil penjualan minyak bumi yang dilakukan oleh Pemerintah Venezuela dengan mitra-mitra ekonomi Venezuela. Masalah minyak menandai keberhasilan ekonomi dan merupakan penyebab pertentangan antara rakyat biasa dengan kalangan konglomerat swasta yang menguasai perusahaan minyak di Venezuela yang kemudian memunculkan gerakan revolusioner dan krisis ekonomi berkepanjangan di Venezuela. Awal abad ke-20, Venezuela dikuasai oleh pemerintahan yang otoriter dan diktator. Sejak tergulingnya Jenderal Marcos Perez Jimenez pada tahun 1958 dan kebijakan penarikan militer secara langsung dalam politik negara, Venezuela mengalami transformasi menjadi negara demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Romulo Betancourt yang berkuasa pada tahun 1958-1964, dengan meletakkan dasar corak politik yang baru. Sistem multipartai diterapkan di Venezuela. Pemerintahannya dikenal dengan program reformasi agraria, negosiasi ulang mengenai royalti minyak dengan perusahaan minyak, dan pembentukan demokrasi di Venezuela.

Ketika pemerintahan Betancourt selesai dan digantikan oleh Carlos Andres Perez, maka tahun 1976 Perez mempercepat nasionalisasi industri minyak Venezuela melalui pembentukan Petroleous de Venezuela S.A (PDVSA). Yaitu sebagian besar produksi minyak dari Venezuela dikuasai oleh perusahaan asing, kebijakan Perez dalam masa jabatannya ditandai dengan kekecewaan yang telah memperburuk keadaan karena pengeluaran dana yang ceroboh serta berkurangnya pendapatan minyak bumi yang menempatkan Venezuela menjadi negara penghutang. Selanjutnya, kekuasaan Perez jatuh akibat buruknya kepemimpinannya dan digantikan oleh Luis Herrera Campins, Presiden Luis mengambil momentum harga minyak yang kembali membaik pada tahun 1980.

Namun, sebagai pemimpin baru, pemerintahannya juga menghabiskan banyak biaya seperti pemerintahan sebelumnya yang mengakibatkan tingkat inflasi tetap tinggi. Sejak tahun 1979 hingga tahun 1982, Venezuela mengalami defisit sebesar 8 miliar dollar. Situasi ekonomi semakin memburuk saat harga minyak menurun lagi pada tahun 1981 dan membuat Venezuela memiliki hutang sebesar 3 miliar dollar menjelang tahun 1983.

Pada tahun 1998 Chavez muncul dalam pemilihan presiden di bawah partai politik MVR (Movimiento Quinta Republica) dan terpilih sebagai Presiden Venezuela, naiknya Hugo Chavez menjadi presiden membawa perubahan besar bagi Venezuela, dengan segera merubah arah kebijakan perekonomian dinegaranya. Negara yang sebelumnya sangat tergantung dengan arah kebijakan perekonomian kapitalis neolib segera diubah Chavez melalui "Revolusi Bolivarian" yang program pembangunannya sangat sosialis, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Venezuela.

Dan pemerintah Venezuela pada masa Chavez juga memberi peringatan kepada perusahaan-perusahaan besar untuk meninggalkan Venezuela dan pergi ke negara lain jika tidak menyetujui persyaratan-persyaratan dari pemerintah. Pada tahun 2014, Venezuela mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia. Penurunan harga minyak dunia tersebut berdampak kepada jumlah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Venezuela. Krisis ekonomi ini terjadi pada Pemerintahan Nicolas Maduro, dimana untuk mengatasi krisis ekonomi Presiden Nicolas Maduro melakukan beberapa upaya seperti, penerbitan mata uang virtual (Petro), nilai mata uang tetap yang ditargetkan kepada investor dan pemotongan biaya impor.

Upaya yang dilakukan oleh Nicolas Maduro tidak berhasil, hal ini disebabkan oleh kegiatan penyelundupan minyak yang membuat pendapatan Venezuela semakin menurun serta buruknya birokrasi Venezuela. Upaya yang tidak berhasil tersebut berdampak kepada krisis dan kelangkaan makanan serta obat-obatan di Venezuela. Kelangkaan dan krisis tersebut mengharuskan masyarakat Venezuela untuk mengungsi ke negara Brazil dan Kolombia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Beberapa masyarakat Venezuela yang memutuskan untuk bertahan di Venezuela melakukan demonstrasi ke Pemerintah Venezuela, dengan tujuan agar pemerintah dapat menyelesaikan krisis yang terjadi dengan cepat.

Namun aksi demonstrasi tersebut tidak disambut dengan baik oleh Presiden Nicolas Maduro dan berakhir kepada aksi kekerasan yang dilakukan oleh tentara Venezuela. Keadaan Venezuela yang semakin memburuk membuat Amerika Serikat (AS) berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada Venezuela. Pada masa Pemerintahan Donald Trump, AS secara berkala memberikan bantuan kepada Venezuela. Bantuan yang diberikan oleh AS ke Venezuela dalam bentuk humanitarian aid, berupa pemberian bantuan makanan, obat-obatan, peralatan medis. Bantuan tersebut disalurkan melalui USAID (United State Agency for International Development) sejak tahun 2017. Namun bantuan yang diberikan oleh USAID tidak diterima oleh Presiden Nicolas Maduro, karena dianggap telah menganggu kedaulatan dan ikut campur dalam domestik dari Venezuela. Keterlibatan AS di krisis Venezuela, membuat Presiden Nicolas Maduro memblokir semua jalur bantuan yang berada di Venezuela. Salah satu jalur yang diblokir atas perintah Presiden Nicolas Maduro adalah Kolombia, yang merupakan jalur utama masuknya bantuan yang diberikan oleh AS. Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Presiden Nicolas Maduro merupakan bentuk penolakan atas bantuan yang diberikan oleh AS, di mana Presiden Nicolas Maduro menganggap krisis yang terjadi dapat diatasi oleh Venezuela tanpa memerlukan bantuan dari negara lain.

Dari uraian latar belakang diatas dan setelah mendapatkan gambaran yang mendalam maka dapat diidentifikasi rumusan persoalan yang menonjol terhadap Negara Venezuela adalah : Pertama, apa yang melatar belakangi Amerika Serikat memberikan dukungan bantuan kepada Venezuela; Kedua, mengapa Venezuela menolak bantuan dari Amerika Serikat; Ketiga, apa penyebab putusnya hubungan diplomatik Venezuela dengan kolombia, sehingga terdapat rumusan masalah bagaimana pengaruh Amerika Serikat terhadap putusnya hubungan diplomatik negara Venezuela dan negara Kolombia.

Pembahasan

Venezuela merupakan negara yang paling berasksi atas kerjasama militer AS dengan Kolombia.

Secara geografis Venezuela dan Kolombia berbagi perbatasan sepanjang 2000 km dan secara jelas Venezuela menyatakan bahwa perjanjian tersebut menimbulkan ancaman militer bagi negara negara di kawasan Amerika Latin. Lebih jauh, melalui menteri pertahanannya, Venezuela memperlihatkan bagaimana kesiapannya dalam menghadapi ancaman militer asing.



Peta Wilayah Negara Venezuela dan Kolombia

Kebebasan militer AS di dalam menggunakan tujuh pangkalan militer di Semenanjung Kolombia yang mana masing-masing ditempati 800 hingga 1000 personil tentara militer, melahirkan ketakutan bagi Venezuela. Bagi Venezuela keadaan semacam itu merupakan sebuah rambu-rambu, di mana perjanjian tersebut merupakan langkah awal dari AS untuk menginvasi Venezuela. Respon yang ditunjukkan oleh Venezuela merupakan sebuah bentuk ketakutan yang logis.

Latar Belakang Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Venezuela

Adapun latar belakang Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Venezuela yang selama ini dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya minyak, justru tengah mengalami krisis ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang disebut sebagai Krisis Venezuela. Krisis Venezuela pada awalnya dipicu oleh krisis ekonomi yang salah satunya dapat dilihat sejak akhir 2016 saat Venezuela mengalami hiper inflasi dengan angka inflasi Bolivar berada lebih dari 1,3 juta sejak November 2018 hingga Maret 2019.

Krisis ekonomi ini yang dialami Venezuela kemudian diperburuk dengan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan perselisihannya dengan pemimpin partai oposisi Majelis Nasional Venezuela yang dipimpin oleh Juan Guaido.



Presiden Venezuela, Nicolas Maduro



pemimpin partai oposisi Majelis Nasional Venezuela Juan Guaidó.

Dalam mengatasi krisis tersebut, Amerika Serikat kemudian melakukan beberapa upaya campur tangan kepada Venezuela, salah satu upaya yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang pada akhirnya ditolak oleh Presiden Maduro. Akan tetapi, Amerika Serikat tetap melakukan upaya-upaya lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Venezuela, salah satunya melalui kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan Amerika Latin. Krisis tersebut diawali dengan adanya penurunan dari harga minyak mentah dunia sejak tahun 2013.

Penurunan harga minyak ini kemudian memberikan dampak buruk pada perekonomian Venezuela karena sebesar 95% perekonomian-nya berasal dari ekspor minyak. Kedua, nilai tukar mata uang Venezuela yaitu Bolivar yang terus mengalami devaluasi dalam beberapa tahun terakhir.

Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di Venezuela tersebut, Amerika Serikat yang dibantu dengan badan independen pemerintah Amerika Serikat yang berfokus dalam pemberian bantuan kepada negara lain, yaitu *United States Agency for International Development (USAID)* kemudian berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Venezuela. Terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, Amerika Serikat telah memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak US\$ 472,4 juta. Jumlah tersebut meliputi bantuan kemanusiaan yang diberikan secara langsung kepada Venezuela dan kepada 18 negara yang turut membantu masyarakat yang memilih untuk keluar dari Venezuela, seperti Kolombia, dan Brazil. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini meliputi, obat-obatan, staf medis, makanan, air minum bersih, dan kebutuhan-kebutuhan keseharian lainnya.

Namun, terdapat hambatan bagi Amerika Serikat dalam memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada Venezuela karena adanya rezim penolakan dari Maduro terhadap bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat. Maduro menyebut bahwa Venezuela bukan negara pengemis dan menganggap bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan bantuan palsu yang diberikan hanya untuk menggulingkan kepemimpinan Maduro. Penolakan tersebut juga dapat dilihat dari adanya beberapa buah peti kemas yang sengaja ditaruh oleh Maduro untuk memblokir jembatan yang menghubungkan Venezuela dan Kolombia. Selain itu, Maduro juga menutup perbatasannya dengan Brazil serta menutup perbatasan laut dan darat Venezuela dengan Curaçao, Kepulauan Karibia di utara Venezuela. Penutupan perbatasan tersebut dilakukan karena wilayah-wilayah ini dianggap sebagai tempat penampungan bantuan kemanusiaan Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, Maduro juga menugaskan angkatan bersenjata untuk berjaga di sekitar wilayah perbatasan. Penolakan yang dilakukan oleh Maduro tersebut salah satunya didasari oleh sejarah hubungan Amerika Serikat dengan Venezuela yang memang memburuk dan menimbulkan rasa saling tidak percaya antara kedua negara. Namun, meskipun merasa dipersulit dengan penolakan dari Maduro, hal ini tidak menyurutkan langkah Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang kemudian lebih memilih untuk memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat Venezuela yang bermigrasi ke negara-negara tetangga Venezuela. Lebih lanjut, Amerika Serikat juga berusaha untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada masyarakat yang berada di dalam Venezuela melalui Juan Guaido.

Mengapa Venezuela menolak bantuan dari Amerika Serikat

Beberapa bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela mengalami penolakan dari Venezuela, dimana Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyampaikan penolakan bantuan dari Amerika Serikat. Penolakan bantuan yang dilakukan oleh Venezuela membuat AS kembali menjatuhkan sanksi ke Venezuela. Sanksi yang diberikan dalam bentuk *Executive Order (E.O)* 13835, 13808 dan 13827, dimana berisi tentang larangan dalam segala bentuk transaksi baik tunai maupun non tunai oleh person maupun kelompok ke AS. Kemudian sanksi juga menjelaskan tentang larangan kepada seluruh masyarakat AS untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dengan Venezuela. Keterlibatan AS di krisis Venezuela, membuat Presiden Nicolas Maduro memblokir semua jalur bantuan yang berada di Venezuela. Salah satu jalur yang diblokir atas perintah Presiden Nicolas Maduro adalah Kolombia, yang merupakan jalur utama masuknya bantuan yang diberikan oleh AS.

Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Presiden Nicolas Maduro merupakan bentuk penolakan atas bantuan yang diberikan oleh AS, di mana Presiden Nicolas Maduro menganggap krisis yang terjadi dapat diatasi oleh Venezuela tanpa memerlukan bantuan

dari negara lain. Kemudian tahun 2019, AS kembali memberikan bantuan kepada Venezuela melalui Kolombia. Bantuan yang diberikan berjumlah 200 ton dalam bentuk makanan dan alat medis serta perlengkapan lainnya. Bantuan makanan menjadi salah satu fokus utama dari USAID karena masyarakat Venezuela yang mengungsi ke negara tetangga mulai mengalami masalah kesehatan, dan kekurangan gizi bagi anak-anak dan balita. Kemudian bantuan tersebut juga diberikan dengan tujuan untuk mengurangi beban bagi negara yang menampung imigran Venezuela. Bantuan tersebut diberikan melalui perbatasan antara Venezuela dengan Kolombia.

Bantuan yang diberikan oleh USAID kembali ditolak oleh Venezuela, dengan alasan bahwa bantuan yang diberikan oleh AS berjumlah kecil dan tidak sebanding dengan sanksi yang AS berikan kepada Venezuela. Kemudian Presiden Nicolas Maduro juga mengatakan dalam jumpa pers bulan Februari 2019 yakni *"Ambil semua bantuan kemanusiaan itu dan berikan kepada rakyat Cucuta, yang sangat membutuhkannya"*. Penolakan yang dilakukan oleh Venezuela membuat AS kembali menjatuhkan sanksi E.O 13850, 13692 dan 13884, yang secara keseluruhan menjelaskan tentang larangan transaksi dengan Venezuela, pembekuan aset dari Venezuela yang berada di AS serta sanksi yang berkaitan dengan minyak bumi.

Kemudian melihat situasi Venezuela yang semakin memburuk, pada bulan Februari 2019 Juan Guaido pihak oposisi Venezuela melakukan self-declaration untuk menjadi Presiden Venezuela. Tindakan yang dilakukan oleh Juan Guaido mendapatkan dukungan penuh dari AS, dengan tujuan agar bantuan yang diberikan oleh AS dapat masuk ke wilayah Venezuela.

Adapun apabila dilihat dari mengapa Venezuela menolak bantuan dari Amerika Serikat, dimana Presiden Venezuela Nicolas Maduro menganggap bahwa krisis yang terjadi dapat diatasi oleh Venezuela tanpa memerlukan bantuan dari negara lain, menganggap bahwa ada strategi lain dari Amerika Serikat terhadap bantuan yang diberikan kepada Venezuela yaitu untuk memanfaatkan terhadap kekayaan atau

Sumber Daya Alam yang ada di Venezuela, dimana Venezuela merupakan negara terbesar dari hasil penjualan minyak bumi.

Sebab putusnya hubungan diplomatik Venezuela dengan Kolombia

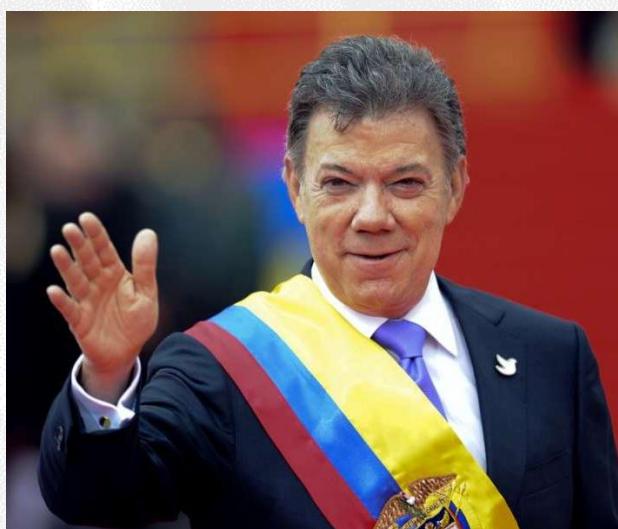
Keterlibatan AS di krisis Venezuela, membuat Presiden Nicolas Maduro memblokir semua jalur bantuan yang berada di Venezuela. Salah satu jalur yang diblokir atas perintah Presiden Nicolas Maduro adalah Kolombia, yang merupakan jalur utama masuknya bantuan yang diberikan oleh AS. Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Presiden Nicolas Maduro merupakan bentuk penolakan atas bantuan yang diberikan oleh AS, di mana Presiden Nicolas Maduro menganggap krisis yang terjadi dapat diatasi oleh Venezuela tanpa memerlukan bantuan dari negara lain. Bantuan yang diberikan oleh USAID kembali ditolak oleh Venezuela, dengan alasan bahwa bantuan yang diberikan oleh AS berjumlah kecil dan tidak sebanding dengan sanksi yang AS berikan kepada Venezuela. Kemudian Presiden Nicolas Maduro juga mengatakan dalam jumpa pers bulan Februari 2019 yakni *"Ambil semua bantuan kemanusiaan itu dan berikan kepada rakyat Cucuta, yang sangat membutuhkannya"*.

Selain menolak bantuan yang diberikan oleh AS, Venezuela juga melakukan pemblokiran di jalur laut dan udara yakni di Curacau di Perairan Karibia. Kemudian Venezuela juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Kolombia pada bulan Februari 2019. Pemutusan hubungan diplomatik ini dilakukan oleh Venezuela dengan alasan Kolombia telah ikut campur dengan masalah domestik Venezuela. Sebagaimana diketahui, Nicolas Maduro masih bersikukuh menolak makanan dan pasokan medis dari Negeri Paman Sam. Ia merasa curiga bahwa seluruh pertolongan itu akan digunakan oleh Amerika Serikat sebagai sarana untuk menjilat pasukannya dan menggulingkan pemerintahan-nya. Dengan tidak baiknya hubungan yang diusung dari awal sehingga Presiden Venezuela memutuskan hubungan Diplomatik dengan Kolombia, dimana hal itu disebutkan oleh Nicolas Maduro Presiden Venezuela pada hari Sabtu, 23 Februari 2019,

setelah negara Kolombia diklaim menjadi tempat penampungan bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat. "Kita tidak bisa terus menjalin hubungan dengan Kolombia, yang digunakan untuk menyerang Venezuela," tegas Maduro pada rapat umum, yang dikutip dari NBC News, Minggu (24/2/2019).

"Untuk alasan itu, aku memutuskan untuk mengakhiri semua hubungan dengan pemerintah fasis Kolombia. Semua diplomat harus angkat kaki dari sini dalam waktu 24 jam. Pergi! Keluarlah. Cukup sudah." Apabila dilihat dari sebab terjadi putusnya hubungan Diplomasi antara negara Venezuela dengan negara Kolombia adalah dikarenakan adanya konflik perbatasan dimana kedua negara tersebut saling berbatasan dan adanya pengaruh dari negara Amerika Serikat, dimana Venezuela dalam hal ini Presiden Nicolas Maduro menganggap bahwa Kolombia adalah merupakan negara yang didompleng untuk menggulingkan pemerintahan Venezuela dibawah kepemimpinan Nicolas Maduro.

Adapun sempat terjadi dimana Kolombia dan Venezuela sepakat memulihkan dialog Diplomatik dan mengawasi normalisasi secara bertahap di perbatasan kedua negara. Langkah itu diambil setelah pertemuan antara Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan timpanannya Presiden Nicolas Maduro. Kedua negara telah terkunci dalam konflik perbatasan selama satu bulan, setelah Maduro memerintahkan penutupan sebagian dari perbatasan yang mengatakan beberapa militernya diserang oleh paramiliter Kolombia selama operasi anti penyelundupan.



Presiden Kolombia Juan Manuel Santos

Presiden Ekuador Rafael Correa yang menjadi tuan rumah pembicaraan di Quito membuat pengumuman dalam sebuah pernyataan bersama dengan mengatakan Santos dan Maduro telah resmi segera mengembalikan duta besar masing-masing. Pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama antara Maduro dan Santos sejak krisis meletus pada 19 Agustus lalu. Maduro juga menuduh Kolombia melancarkan serangan terhadap ekonomi Venezuela sehubungan dengan penyelundupan barang-barang bersubsidi yang semakin merajalela. Sengketa di perbatasan tersebut juga menyebabkan puluhan ribu warga Kolombia dideportasi atau melarikan diri dari Venezuela.

Penutup

Dari uraian tulisan yang penulis uraikan, bahwa negara Venezuela adalah merupakan negara terbesar kelima di dunia sebagai penghasil minyak dunia, selanjutnya dengan adanya konflik perbatasan yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik negara Venezuela dengan negara Kolombia, dimana dengan adanya pengaruh dari Amerika Serikat yang secara berkala memberikan bantuan kepada negara Venezuela yang akan tetapi selalu ditolak segala bantuan dari Amerika Serikat oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro maka dapat disimpulkan bahwa diplomasi yang dilaksanakan oleh mereka berakhir Menang-Kalah.

Demikian tulisan ini dibuat tentang Pengaruh Amerika Serikat terhadap putusnya hubungan Diplomatik negara Venezuela dan negara Kolombia.

**Major Cba I Ketut Arsana Putra,
S.T.,M.Sc. Adalah Abituren Sepa PK
2000 dan Dikreg LX Seskoad. Saat ini
menjabat, Dandenharjasaint I-44-12**



LANGKAH DIPLOMASI ISRAEL TERHADAP NEGARA-NEGARA ARAB GUNA MENCEGAH TERJADINYA PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL – PALESTINA

Letkol Inf Duliagus Tumangger, S.T.

Pendahuluan

Israel merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Timur Tengah dengan mayoritas penduduknya merupakan kelompok etnik Yahudi. Kemerdekaan Israel di tahun 1948 mendapatkan banyak kecaman dari negara-negara Arab yang notabene merupakan negara tetangga. Hal ini disebabkan karena kemerdekaan Israel merupakan bencana besar bagi masyarakat Palestina yang terusir dari wilayah teritorial yang sebelumnya diduduki.

Hingga saat ini Konflik Israel dan Palestina terus berlangsung tanpa menemukan resolusi, sementara kerjasama yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terus menguat. Dibawah kebijakan Trump telah banyak memberikan bantuan kepada Israel termasuk dalam menjalankan upaya diplomasi Israel dengan negara-negara Arab.

Di tengah kompleksitas isu di Timur Tengah, Israel terus melakukan diplomasi bilateral dengan negara-negara Arab yang menyebabkan perpecahan di negara Arab itu sendiri. Pemerintah Israel semakin menunjukkan kegigihannya dalam rangka mempererat hubungan dengan negara-negara di Arab, khususnya yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

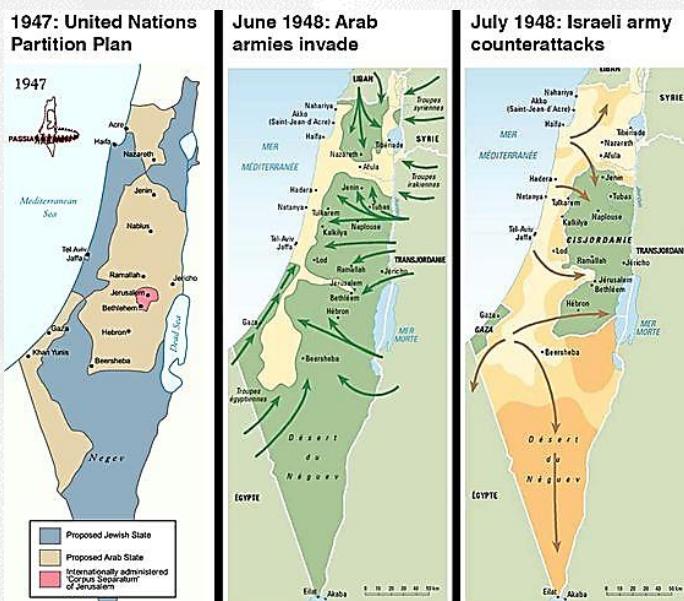
Motif-motif yang dimiliki oleh Israel terhadap kawasan Arab meliputi: (1) pentingnya memiliki pengakuan diplomatik; (2) memperluas jaringan kerja sama perdagangan (terutama senjata militer dan teknologi); dan (3) membentuk aliansi yang strategis. Tentunya tindakan Israel ini merupakan upaya untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya.

Melihat adanya kompleksitas isu yang terus menguat dan gencarnya diplomasi yang dilakukan oleh Israel maka identifikasi persoalan yang dibahas adalah pertama, mengenai latar belakang terjadinya konflik Israel dan Palestina dan tidak adanya resolusi hingga saat ini. Kedua, penulis akan menjabarkan mengenai langkah strategis berupa diplomasi yang dilakukan oleh Israel dengan negara-negara Arab yang berhasil membuka hubungan diplomasi dengan negara Arab seperti Mesir, Uni Arab Emirates (UAE) dan Bahrain. Ketiga, penulis akan membahas mengenai pelajaran yang dapat diambil sebagai keberhasilan diplomasi yang diterapkan oleh Israel. Adapun permasalahan yang perlu didiskusikan adalah *“Bagaimana langkah diplomasi yang dilakukan oleh Israel dengan negara-negara Arab untuk mencegah perang Israel dan Palestina?”*

Pembahasan

Latar Belakang Konflik Israel dan Palestina

Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina terkait perebutan wilayah telah menyita perhatian dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan konflik tersebut telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang sejatinya dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB di artikel pertama poin ketiga, yakni *promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*



Peta wilayah Israel dan Palestina dari masa ke masa

Dalam rentang tahun 1948-1968, Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina serta di sekitar Timur Tengah pada umumnya. Buktinya dalam peperangan pada 1967, beberapa negara Islam yang terlibat, seperti Mesir, Yordania, Suriah, Beirut, Arab Saudi, Irak dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel, tetapi pada kenyataannya umat Islam dengan negara masing-masingnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali itu, Israel menjadi sahnya berdiri sebagai satu negara merdeka dari hasil caplokan beberapa negara Islam yang disebut di atas.

Berdasar pada Proposal Damai, hubungan negara Arab-Israel seharusnya masih mengacu pada Proposal Damai Arab tahun 2002 yang digagas Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud.



Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud.

Proposal Damai Arab itu menegaskan kesediaan dunia Arab dan Islam membuka hubungan diplomatik secara kolektif dengan Israel, dengan imbalan berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 dengan ibu kota Yerusalem Timur. Proposal Damai Arab tersebut sudah seharusnya menjadi pijakan bagi negara - negara Arab dalam merespons isu Palestina. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini, Palestina belum mendapatkan pengakuan kemerdekaan sepenuhnya dan Israel terus menganekasi wilayah Palestina.

Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu, yang harus dilakukan adalah dengan mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global.

Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada untuk menentukan mana alternatif yang paling baik dan yang paling buruk untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri.

Konflik Israel dan Palestina tidak dapat dipandang mudah dengan satu sisi saja. Sejarah yang panjang dan berbagai upaya resolusi konflik yang tidak membawa hasil memperkeruh kondisi dan suasana antara kedua negara.

Langkah Strategis Israel melakukan Pendekatan Diplomasi Bilateral dengan Negara Arab

Diplomasi yang dilakukan oleh Israel sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya dilakukan untuk mendekati negara-negara Arab. Sebagai fakta, Setelah bertahun-tahun hubungan Mesir-Israel terbatas pada koordinasi keamanan dan intelijen, diplomasi Mesir kini bercita-cita menjadi peran penting dalam hubungan tersebut. Kunjungan tersebut menunjukkan kecenderungan di mana Israel dapat mengalihkan hubungannya dengan negara-negara Arab dari balik pintu tertutup ke ruang publik.

Kairo percaya bahwa hubungan dengan Israel secara strategis dan diplomatis menguntungkan bagi pemerintah Al Sisi dan posisi regional negara tersebut. Kecenderungan ini menuju pemulihkan hubungan yang lebih besar dan kemungkinan akan berlanjut. Hal itu terbukti dengan keharmonisan hubungan Mesir dan Israel yang semakin mencuat ke publik setelah Al Sisi (Mesir) dan Netanyahu (Israel) bertemu untuk pertama kalinya secara terang-terangan di New York pada 18 September 2017 lalu.



Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi



PM Israel Benjamin Netanyahu

Pertemuan itu dilakukan Al Sisi guna berusaha mengembalikan dialog proses perdamaian Timur Tengah khususnya terkait Israel-Palestina. Tidak hanya dengan Israel, Sisi juga melakukan pertemuan terpisah dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk terus bekerjasama dalam mengusahakan solusi dua negara. Namun hingga saat ini perbatasan untuk solusi tersebut masih dalam tahap negosiasi dan sengketa.



Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa peningkatan hubungan Israel-Mesir berdampak pada konflik Israel-Palestina. Berkat kedudukan yang lebih baik dengan Israel, Mesir mampu menengahi pembicaraan antara Fatah dan Hamas tanpa takut akan reaksi Israel yang akut. Memainkan peran mediator memberi pengaruh lebih besar kepada Mesir pada Hamas yang didukung Israel.

Pada tahun lalu, Mesir telah mengisyaratkan sikap yang lebih damai terhadap tuntutan Israel dalam konflik. Mesir tidak lagi bersikeras bahwa semua Yerusalem harus menjadi ibu kota negara Palestina.

Sedangkan terkait hubungan Israel dan UEA. Kedua negara membentuk pola diplomasi ekonomi. Israel akan segera menjadi mitra dagang utama UEA, demikian juga sebaliknya. UEA sudah sangat berminat membangun hubungan dagang, khususnya di sektor teknologi, dengan Israel. Bahkan sektor ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong UEA membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel meskipun isu Palestina masih jauh dari selesai.

masing-masing kepentingan ekonomi negaranya. Hal ini menjadi pintu dan gerbang Israel untuk membuka kerjasama dengan negara lain di Arab. Israel juga sudah sejak lama memiliki impian untuk menembus pasar Arab Teluk yang kaya, dikenal sebagai pasar terbesar dan terkuat di dunia Arab. Negara-negara Arab Teluk itu tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk atau *The Gulf Cooperation Council (GCC)*, yang beranggotakan Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, dan Kesultanan Oman, yang didirikan pada 1981.



The Gulf Cooperation Council (GCC)



Heads of states of the GCC in Abu Dhabi on 25 May 1981

Penutup

Diplomasi dan negosiasi yang dilakukan Israel ditengah konflik Israel dan Palestina yang masih terjadi menjadi contoh bahwa ditengah konflik suatu negara tetap bisa kelakukan diplomasi dan negosiasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan AS, UEA, dan Israel secara jelas telah melatarbelakangi disepakatinya normalisasi hubungan UAE dan Israel. Kepentingan AS terkait dengan rencana Trump (yang saat itu) sedang berusaha memenangkan kembali Pilpres AS dan kebijakannya di Timur Tengah yang lebih memihak Israel. Sementara, kepentingan ekonomi telah menjadi faktor penentu bagi UAE dan Israel untuk meresmikan hubungan diplomatiknya. Selain itu, kepentingan nasional Israel dapat tercpai dengan mudah dengan adanya hubungan diplomatik yang dibentuk bersama dengan negara-negara Arab seperti Mesir, UAE dan Bahrain.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk diplomasi yang dijalankan oleh Israel ditengah konfliknya dengan Palestina telah berhasil melakukan pendekatan dengan negara-negara Arab yang telah meratifikasi perjanjian damai, sebaliknya pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Negara Arab telah meruntuhkan solidaritas negara-negara Arab itu sendiri.

Dukungan politik dan diplomasi yang dilakukan Israel berhasil mendapatkan tempat di UAE, Bahrain dan Mesir. Tidak menutup kemungkinan, negara-negara Arab lainnya akan turut membuka peluang kerjasama dan diplomasi dengan Israel. Keberhasilan Israel ini merupakan bentuk diplomasi yang bisa membuat isu Konflik-Israel dan Palestina semakin memanas.

Letkol Inf Duliagus Tumangger, S.T. Abituren Sema PAPK 1998, dan lulusan Dikreg Seskoad 2021. Saat ini menjabat sebagai Pabandya-sundiksdirjianbang Seskoad



STRATEGI NEGARA AUSTRIA DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19

TIM POK Pasis DIKREG 60 SESKOAD TA 2021

Pendahuluan

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Austria, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 di masing-masing negara berbeda, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah masing-masing. Oleh karena itu, maka tingkat keberhasilan antar negara dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 pun beragam.

Sehingga perlu kiranya kita memahami strategi penanganan dampak pandemi Covid-19 negara-negara di dunia, sebagai referensi strategi nasional Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan langkah-langkah yang efektif. Tulisan ini membahas, “Bagaimana Strategi Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Negara Austria?”.

Pembahasan

Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus Corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19.

Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri (APD). Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus Corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan di sarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus Corona.

Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu; merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.

Pada kasus yang parah, infeksi virus Corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi seperti, Pneumonia (infeksi paru-paru), Infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, *Acute cardiac injury*, *Acute respiratory distress syndrome* dan kematian. Selain itu, saat ini muncul istilah long haul COVID-19. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif, namun tetap merasakan keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul. Virus corona sudah sampai Austria dari negara tetangganya Italia, yang sekarang menjadi negara paling parah oleh wabah virus corona.

Austria pada Kamis, 12 Maret 2020 melaporkan kasus pertama kematian karena virus corona dan pasien yang terjangkit virus corona sejauh ini di negara itu. Austria akan memperkenalkan kebijakan baru terkait memperlambat penyebaran virus corona atau COVID-19 di negara itu. Ketika itu, pada Jumat, 13 Maret 2020, Pemerintah Austria mengatakan pihaknya akan melakukan prosedur pemeriksaan di wilayah-wilayah perbatasan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kondisi pandemi Covid-19 di negara Austria dilihat dari jumlah orang yang terpapar, jumlah orang yang sembuh serta jumlah orang yang meninggal. Austria sedang beralih dari jam malam dan penutupan sebagian menjadi *lockdown* nasional kedua yang akan diberlakukan setidaknya selama dua setengah minggu, menyusul kasus COVID-19 yang meningkat pesat.

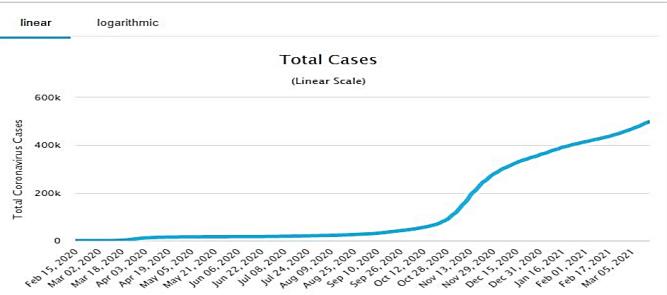
Kanselir Sebastian Kurz mendesak warga Austria untuk tidak bertemu siapa pun dari

luar rumah mereka dalam upaya untuk menekan penyebaran virus corona. Dia kemudian mengatakan bahwa sekolah akan ditutup dan siswa akan belajar dari rumah ketika peraturan baru mulai berlaku pada hari Selasa 17 November 2020. Austria melaporkan jumlah rekor 9.586 infeksi harian baru pada hari Jumat (13/11). Angka itu sembilan kali lebih tinggi dibandingkan puncak gelombang awal awal tahun ini. Negara ini telah mencatat lebih dari 501,224 kasus sejak awal pandemi, dan 8,956 kematian terkait COVID-19 serta jumlah yang sembuh sebanyak 463,714 orang (17/3/21).

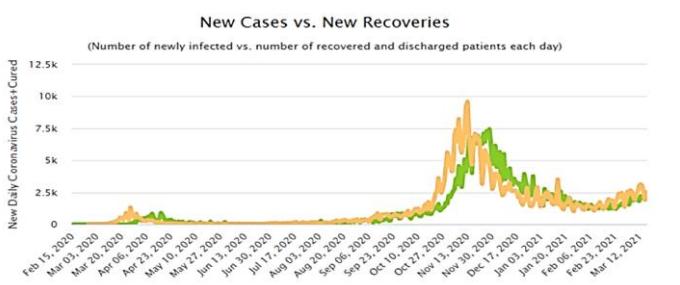


Kanselir Austria Sebastian Kurz

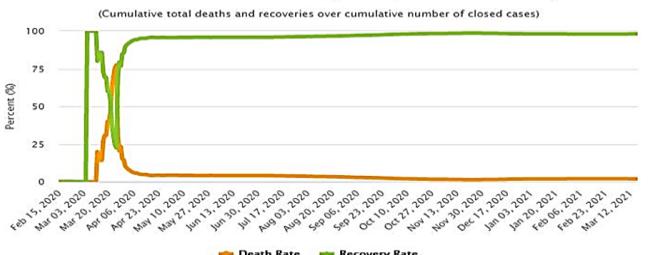
Langkah-langkah penguncian baru, yang akan membuat semua toko dan layanan yang tidak penting - termasuk penata rambut - tutup, akan tetap berlaku hingga 6 Desember 2020. Orang telah diberitahu untuk bekerja di rumah sedapat mungkin. Menteri Kesehatan Austria Rudolf Anschober mengatakan itu adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan layanan kesehatan agar tidak runtuh di bawah tekanan infeksi baru. Dia mengatakan Austria telah melakukannya sekali dan mereka bisa melakukannya lagi. Austria melakukan penguncian nasional pertamanya pada bulan Maret, selama gelombang pertama pandemi. Di tengah meningkatnya jumlah, ibu kota Wina telah memberlakukan penguncian sebagian, termasuk jam malam dari pukul 20:00 hingga 06:00, pada awal November.



Total Kasus Virus Corona di Austria



Total Kematian akibat Virus Corona di Austria



Perbandingan Jumlah Yang meninggal dan yang sembuh

Dari data diatas dapat dilihat kondisi Austria akibat pandemi Covid-19 bahwa jumlah yang terinfeksi Virus Corona sampai dengan Maret 2021 cukup tinggi yaitu 501.244 orang. Jumlah yang terinfeksi dengan jumlah yang sembuh lebih banyak jumlah yang sembuh setiap harinya sehingga menyebabkan kondisi Negara tersebut semakin membaik. Jumlah kematian dan jumlah yang sembuh lebih tinggi jumlah yang sembuh, berarti penanganan yang baik di Austria menyebabkan tingginya jumlah orang yang sembuh di Austria. Kasus COVID-19 di Eropa kini menjadi perhatian seluruh dunia.

Pasalnya, beberapa negara kembali mencatat lonjakan kasus COVID-19 dan kasus harian berlipat ganda. Austria sempat menetapkan *lockdown* kedua usai pandemi COVID-19 menjadi tak terkendali. Kanselir Austria Sebastian Kurz mengumumkan *lockdown* kedua ini pada Sabtu (31/10/2020). Aturan *lockdown* yang kembali diterapkan mengikuti Jerman. "Sekolah, penata rambut, dan toko non-esensial akan tetap buka kali ini, dan larangan meninggalkan rumah hanya berlaku pada malam hari," sebutnya. "Restoran, kafe, dan hotel akan tutup kecuali makanan untuk dibawa pulang dan untuk pelancong bisnis. Gym, bioskop, dan teater juga akan ditutup. Aturan akan mulai berlaku pada hari Selasa dan tetap berlaku hingga akhir November," jelas Sebastian Kurz. Austria kembali menerapkan *lockdown* untuk ketiga kalinya untuk membendung kasus corona yang kembali melonjak. *Lockdown* dimulai 26 Desember 2020 hingga 24 Januari 2021.

Kanselir Sebastian Kurz mengatakan, pada 15 atau 17 Januari, pemerintah akan mulai melakukan pelonggaran. Misalnya, warga mulai diizinkan mengunjungi acara budaya dan restoran. Namun pada pelonggaran nanti, hotel dan tempat publik lainnya diminta memeriksa hasil tes corona pengunjung pada saat kedatangan. Polisi akan melakukan pemeriksaan acak di daerah-daerah. Selama tiga minggu pertama, Austria akan menutup toko-toko dan kegiatan non-esensial.

Masyarakat juga akan dibatasi pergerakannya di luar rumah. Bahkan untuk membeli makan dan melakukan olahraga. Perkembangan Virus Corona yang belum mereda menyebabkan kondisi Austria berkali-kali menetapkan *Lockdown* di negaranya.

Peringkat Austria di dunia dilihat dari jumlah yang terpapar.

Hampir semua negara di Eropa mengawali pertarungan tersengitnya melawan virus Corona pada awal Maret lalu. Dan sinyal harapan muncul dalam sepekan terakhir ketika kurva jumlah kasus dan kematian menunjukkan penurunan yang berarti. Meski kepahitan dan penderitaan akibat wabah virus Corona ini butuh waktu lama untuk

memulihkannya ke keadaan semula. Covid-19 telah memberikan dampak negatif terhadap sejumlah sektor kehidupan manusia seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Update terbaru pandemi Covid-19 di dunia menunjukkan situasi belum dapat kembali normal. Penambahan pasien corona lagi-lagi meningkat, begitu juga dengan kasus kematian corona.

Berdasarkan data terbaru dari *Worldometers* sebagaimana dikutip oleh *Pikiran-Rakyat.com* jumlah kasus Covid-19 dunia pada Rabu, 17 Maret 2021 pagi WIB mencapai 121.212.674 kasus. Dalam data tersebut, Amerika Serikat hingga saat ini masih menempati posisi pertama tingkat kasus Covid-19 dunia dengan total kasus 30.189.873, dengan penambahan kasus baru dalam 24 jam terakhir sebanyak 50.265 orang. Adapun peringkat Austria menduduki peringkat ke-37 dengan total 501.244 kasus. Penyebaran virus corona secara global, masih terus bertambah dari hari ke harinya.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Negara Austria.

Dunia usaha mengalami tantangan amat berat. Sekitar setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia menghadapi risiko kekurangan uang dan atau kehilangan pekerjaan dalam berbagai tingkatannya. Sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Jutaan petani di dunia, begitu juga pekerja migran menghadapi situasi ekonomi yang berat dengan berkurang atau bahkan hilangnya penghasilan mereka. Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Banyak negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya. Yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi.

Penerapan *lockdown* di Austria sangat berdampak pada perekonomian Austria. Kebijakan ini membuat restoran, sekolah, dan tempat non-esensial lainnya ditutup. Warga pun diminta untuk tetap berada dan bekerja di rumah jika memungkinkan.

Untuk diketahui, sebagai upaya untuk menekan bertambahnya jumlah kasus COVID-19, pemerintah Austria menerapkan kebijakan *Restriction on Movement*. Residen Austria dilarang untuk meninggalkan kediaman kecuali untuk kebutuhan pangan, obat, pekerjaan yang bersifat esensial, maupun hal mendesak lainnya. Sekolah, universitas, tempat rekreasi, restoran, hingga bisnis yang bersifat nonesensial tutup sejak kebijakan ini berlaku. Kebijakan tersebut berdampak bagi pelaku bisnis maupun perekonomian Austria. Penutupan sebagian tempat kerja di Austria pada kurun tiga kuartal tahun 2020 ini mengakibatkan kehilangan pendapatan pekerja karena hilangnya jam kerja.

Ekonomi Austria alami resesi setelah pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 12,8%. Di mana pada kuartal I-2020 pertumbuhan ekonomi Austria minus 2,8%.

Strategi dalam mengatasi kondisi tersebut.

Sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Austria, salah satunya adalah pembatasan aktivitas sosial, langkah yang juga dipraktikkan oleh negara lain.

Warga Austria boleh keluar melakukan kegiatan di luar rumah hanya dengan 3 alasan. Tiga alasan tersebut diantaranya, bekerja, membeli makanan dan obat dan membantu penduduk lain dalam kelompok rentan seperti lansia. Selain itu, ada juga pembatasan akses keluar masuk negara Austria. Jadi, di Austria tidak dilakukan *lockdown* secara total, tetapi untuk akses masuk sudah ada beberapa larangan. Contoh larangan adalah penerbangan ke sejumlah negara yang berisiko virus corona tinggi seperti Spanyol, Italia, Perancis, dan sejumlah negara lainnya.

Selain itu, langkah pemerintah Austria dalam penanganan virus corona adalah pembatasan acara keramaian, pembatasan waktu bisnis, larangan keluar masuk ke beberapa negara, mengurangi kontak sosial. Adapun stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah Austria adalah membuat dana krisis corona, jaminan kredit, dan pengurangan pajak.

Dibidang ekonomi pemerintah Austria menerapkan beberapa kebijakan sebagai langkah utama, pemerintah memberikan bantuan sebesar 38 miliar euro (sekitar Rp52,9 triliun) untuk menekan dampak COVID-19 terhadap perekonomian Austria. Upaya lain dilakukan pemerintah melalui relaksasi kebijakan pajak. Sampai dengan 26 Maret 2020, terdapat setidaknya empat poin relaksasi kebijakan pajak yang disampaikan pemerintah melalui situs resmi Kementerian Keuangan Austria.

Pertama, apabila wajib pajak dapat membuktikan bahwa bisnisnya secara signifikan terdampak COVID-19, seperti masalah likuiditas, maka wajib pajak tersebut dapat mengajukan pengurangan atas pajak penghasilan (PPh) dibayar di muka.

Kedua, wajib pajak dapat mengajukan penangguhan pembayaran pajak ataupun pembayaran pajak dengan cara angsuran. Pemerintah sendiri telah memberikan bantuan sebesar 10 miliar euro untuk penangguhan pembayaran pajak.

Ketiga, tenggat waktu pembayaran sanksi atas pelanggaran sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak diperpanjang. Hal ini juga berlaku atas tenggat waktu pengajuan serta proses upaya hukum keberatan maupun banding yang masih berjalan pada 16 Maret 2020 atau mulai berjalan antara 16 Maret 2020 hingga 30 April 2020.

Keempat, hibah sehubungan dengan COVID-19 dikecualikan dari objek pajak. Namun, beban yang ditanggung akan dianggap sepenuhnya sebagai beban operasional.

Ada banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk "menyelamatkan" bisnis keluarga dari dampak buruk ekonomi akibat pandemi corona (Covid-19).

Di Austria misalnya, negara ini membagikan voucher makan sebesar 50 euro atau sekitar Rp 858.000 (kurs Rp 17.168/euro) untuk tiap keluarga di ibu kota Wina untuk dibelanjakan di restoran atau kafe setempat. Langkah ini, tulis Bloomberg, dilakukan pasca-restoran dan kafe dibuka Kembali Jumat pekan lalu. Sebelumnya jenis usaha ini ditutup sejak 16 Maret.

Dalam pengumumannya melalui media sosial, Wali Kota Wina Michael Ludwig mengatakan strategi ini adalah bagian dari stimulus US\$ 40 juta euro atau Rp 687 miliar. Untuk mereka yang single, voucher makan juga akan diberikan sebesar US\$ 25 euro atau Rp 429.000. Nantinya, restoran akan menukar dengan uang tunai. Sebelumnya, pemerintah federal Austria juga merencanakan memotong pajak seperti PPN pada minuman non alkohol dan retribusi pada anggur bersoda.



Pemandangan si salah satu Café di Austria Ketika Lockdown

Persoalan yang dihadapi Negara Austria terkait dengan pengadaan dan penggunaan vaksin

Dalam menghadapi penyebaran Virus Corona di Austria, Negara tersebut menggunakan Vaksin dari Astra Zeneca. Namun pelaksanaannya dihentikan sementara setelah ada laporan kasus kematian pasca di suntik vaksin tersebut. Otoritas Austria menangguhkan pemberian sejumlah vaksin COVID-19 yang dikembangkan Astra Zeneca. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk menyelidiki kasus kematian yang terjadi pasca penyuntikan. "Kantor Federasi untuk Keselamatan dalam Perawatan Kesehatan (BASG) telah menerima dua laporan yang sementara dihubungkan dengan vaksinasi pada batch yang sama dari vaksin AstraZeneca di klinik distrik Zwettl, Lower Austria," kata perwakilan BAGS yang dikutip dari Reuters, Senin (8/3/2021). Laporan tersebut berisi seorang wanita berusia 49 tahun meninggal akibat gangguan koagulasi yang parah. Sementara satu kasus lainnya, dialami wanita berusia 35 tahun yang mengalami emboli paru dan sedang dalam masa pemulihan. Emboli paru adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh gumpalan darah yang terlepas.

Diketahui kedua wanita tersebut merupakan perawat yang bekerja di klinik Zwettl. Dalam laporannya, BASG mengatakan pembekuan darah diketahui bukan salah satu efek samping dari vaksin.



Klinik Zwettl di provinsi Lower Austria,

Hal ini membuat otoritas setempat lebih serius dalam melakukan penyelidikan. "Sebagai tindakan pencegahan, sisa stok batch vaksin yang terkena dampak tidak lagi diberikan atau divaksinasi," lanjutnya. Menanggapi hal ini, juru bicara dari pihak AstraZeneca mengatakan tidak ada kejadian efek samping serius yang berkaitan dengan vaksin. Selain itu, mereka juga telah berkomunikasi dengan otoritas Austria dan mendukung penuh penyelidikan tentang kasus kematian tersebut. Selama uji coba, efek samping yang disebabkan oleh vaksin hanya bersifat sementara. Selain itu, efek samping berupa pembekuan darah tidak pernah dilaporkan.

Akibat adanya laporan kematian pasca penyuntikan Vaksin, pihak berwenang Austria telah menangguhkan inokulasi yang menggunakan vaksin Covid-19 AstraZeneca sebagai tindakan pencegahan. Badan kesehatan Austria mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menyelidiki kematian satu orang dan menyebabkan reaksi penyakit pada satu orang lainnya setelah mendapatkan suntikan.

Penutup.

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Austria, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Austria termasuk salah satu Negara yang terdampat Covid-19. Negara tersebut juga memberlakukan *lockdown* untuk mengatasi penyebaran virus tersebut. Berbagai kebijakan diberlakukan seperti jam malam, kebijakan dalam hal perpajakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat virus tersebut. Austria menempati urutan ke-37 dunia dilihat dari jumlah yang terpapar. Kebijakan pemberian Vaksin di Negara tersebut sempat dihentikan akibat adanya laporan kematian akibat pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca.

Demikian tulisan ini kami buat, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, dengan demikian penulis mohon masukan dan saran untuk kesempurnaan tulisan ini.



Tim Pok Pasis Dikreg 60 Seskoad



PERISTIWA REVOLUSI BELUDRU DAN BANGKITNYA SLOVAKIA

Major Inf Wahyu Widya Sasono

Pendahuluan

Nicholshon menyatakan bahwa "Asal mula diplomasi ikut terkubur di kegelapan zaman yang mendahului fajar sejarah." Masuk akal bila ada yang beranggapan bahwa pada saat manusia mulai kehidupan berkelompok, perhubungan, termasuk negosiasi untuk berbagai tujuan juga merupakan salah satu bentuk diplomasi. Perhubungan-perhubungan ini yang menjalankan berbagai tujuan seperti penghentian permusuhan, pembicaraan penggunaan padang rumput, pertukaran istri, dan sebagainya, di antara kelompok-kelompok manusia yang berbeda, bisa dianggap sebagai bukti adanya diplomasi pada zaman pra-Sejarah.

Keruntuhan Cekoslovakia ditandai dengan diumumkannya Revolusi Beludru atau Revolusi Tenang (nezná revolúcia) pada November 1989. Revolusi Beludru merupakan gerakan menuntut transisi kekuasaan dan perubahan sistem pemerintahan Cekoslovakia secara damai, Revolusi Beludru bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslovakia dari komunis menjadi demokrasi. Kebijakan Glasnost (keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi) yang diterapkan Uni Soviet berhasil membuka jalan perjuangan masyarakat Cekoslovakia untuk melakukan Revolusi Beludru.

Vaclav Havel memimpin jalannya Revolusi Beludru pada tahun 1989. Ia melakukan mobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah. Selama bulan November hingga Desember 1989, mereka terus menuntut adanya restrukturisasi politik dan pemberlakuan demokrasi kepada pemerintah.

Gerakan demonstrasi massa dalam Revolusi Beludru dilakukan secara tenang dan damai. Pada perkembangannya, Revolusi Beludru mampu menumbangkan kekuasaan rezim komunisme di Cekoslovakia. Setelah mengalami kegagalan dalam negosiasi, Slovakia memutuskan untuk memisahkan diri dari Cekoslovakia. Pada Januari 1993, secara resmi Cekoslovakia runtuh dan pecah menjadi dua negara berdaulat yaitu, Republik Ceko dan Slovakia.

Mencermati uraian tersebut di atas, penyebab terjadinya Revolusi Beludru adalah sebuah cara untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslovakia dari komunis menjadi demokratis pada bulan November 1989 yang digagas oleh Vaclav Havel. Penulis memilih Revolusi Beludru sebagai salah satu bahan pembelajaran tentang diplomasi dan negosiasi atas permasalahan yang mengemuka di negara-negara dunia serta dapat diambil nilai manfaat di masa mendatang.

Pembahasan.

Bericara mengenai Slovakia sendiri yaitu sekitar abad ke – 6 wilayah Slovakia dihuni oleh bangsa *Salvic* dan *Slovac*. Secara politis pada abad ke – 9 mereka dipersatukan oleh kerajaan Moravia. Pada tahun 907 M bangsa Jerman dan Hongaria (*The Magyans*) menundukkan Moravia dan sejak saat itu Slovakia berada di bawah kendali Hongaria sampai dengan tahun 1918. Ketika penguasa Austro – Hongaria (*The Habsburg*) hancur pada tahun 1918 menyusul kekalahan pada PD – 1.

Slovakia bergabung dengan Ceko (Bohemia), Moravia, dan sebagian Silesia menjadi negara baru dengan nama *Czechoslovakia* (Cekoslovakia). Pada Maret 1938, Jerman menduduki Cekoslovakia dan menjadikan protekrat. Sejak saat itu, Slovakia menjadi negara boneka Jerman, dengan Mansignor Josef Tiso sebagai Perdana Menteri. Pada musim semi 1945, akhir PD – II, Slovakia dibebaskan dari Jerman oleh tentara Soviet, dan Slovakia bergabung kembali menjadi negara Cekoslovakia yang baru. Cekoslovakia merupakan sebuah negara komunis yang terletak di kawasan Eropa Timur.

Negara ini berdiri pada tahun 1918 dengan nama Republik Sosialis Cekoslovakia. Secara umum, masyarakat Cekoslovakia dari dua etnis yaitu, Ceko dan Slovakia. Selama Perang Dingin, Cekoslovakia masuk dalam aliansi pertahanan Pakta Warsawa dan aktif dalam forum-forum komunis internasional. Pada periode PD-II, Cekoslovakia menjadi negara komunis di wilayah Eropa Timur di bawah pengaruh Soviet. Pada 1989, pengaruh Soviet mulai terkikis dan Cekoslovakia kembali menjadi negara yang bebas.

Sejarah Republik Sosialis Cekoslovakia dimulai dari naiknya rezim komunis pada tahun 1948 , tetapi pertarungan kekuasaan di dalam Partai Komunis Cekoslovakia (KSC) telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II. Waktu itu kepemimpinan partai dipegang oleh Rudolf Slansky (Sekretaris Jenderal) dan Klement Gottwald (Ketua) yang juga memiliki Perdana Menteri Cekoslovakia. Selama Perang Dunia ke-II, mereka memilih mengungsi ke Moskow dan mengkoordinir perlawanan terhadap Nazi Jerman dari sana.

Di Moskow mereka termasuk pemimpin-pemimpin negara tetangga Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Sekembalinya ke Cekoslovakia, keduanya berhasil membangun kembali partai KSC (Partai Komunis Cekoslovakia) dan memenangkan Pemilu pada 1946 dengan meraih sekitar 40% suara pemilih. Pemerintahan dijalankan oleh koalisi Front Nasional, sebuah koalisi 6 partai, di mana Partai Komunis Cekoslovakia menduduki 2/3 kursi, sementara yang 5 partai lagi hanya memperoleh 1/3 bagian. Akan tetapi kekompakan dan kerjasama antara kedua pemimpin Cekoslovakia tersebut tidak berlangsung lama. Menjelang tahun 1950-an Joseph Stalin yang menjalankan kekuasaan 'tangan besi' di Uni Soviet, memperingatkan orang-orang partai komunis di negara-negara Eropa Tengah dan Timur, terutama orang-orang sosialis-komunis keturunan Yahudi, yang tidak setia kepada Uni Soviet.

Stalin segera melakukan gerakan ancaman terhadap orang-orang tersebut, yang berdampak pada timbulnya pertentangan internal dan saling mencurigai di berbagai partai di negara setempat antara yang mendukung dan teman Stalin. Di Uni Soviet sendiri, Stalin dituduh tidak setia, terutama yang dicap sebagai pengikut-pengikut Trotsky.

Sementara itu di Yugoslavia, Josip Broz Tito (yang kemudian dicap Trotskyis oleh rezim Stalin) sedang membangun sistem sosialis sendiri dan tidak mau bergabung dengan Blok Uni Soviet. Gottwald adalah pengikut setia dari cara kepemimpinan Stalin. Malah Slansky yang keturunan Yahudi, bertentangan dengan Stalin hal ini menyebabkan ia kemudian dicurigai, ditangkap dan diadili dengan tuduhan sebagai Titois dan Zionis. Dia disidang dalam serial 'pengadilan politik' bersama 13 orang lainnya dan dijatuhi hukuman mati, yang dilaksanakan pada Desember 1952.

Kembali ke tahun 1948, setelah pemilu 1946 Perdana Menteri Klement Gottwald berhasil membentuk kabinet Front Nasional, yang melibatkan juga tokoh- tokoh dari 5 partai non-komunis. Tetapi kabinet koalisi tersebut tidak berjalan lama. Melalui berbagai intrik yang dilakukan oleh orang-orang partai KSC (Partai Komunis Cekoslovakia), melalui

menteri-menteri komunis yang ada di dalam kabinet, 12 orang menteri non-komunis akhirnya mengundurkan diri dari kabinet, yang menyebabkan kepala negara Edvard Beneš mengambil keputusan untuk membubarkan kabinet. Gottwald kemudian membentuk kabinet baru, yang didominasi oleh Menteri - dari Partai Komunis, dengan demikian terciptalah Pemerintahan Satu partai. Peristiwa inilah yang kemudian disebut orang sebagai 'kudeta-tak-blood' atau 'kudeta-konstitusional' Februari 1948, yaitu pengambil-alihan kekuasaan negara oleh partai komunis.

Pada tahun-tahun berikutnya Gottwald dan pengikut-pengikutnya melakukan penangkapan, mula-mula terhadap orang-orang non-komunis yang dicurigai sebagai 'agen-agen Barat', baru kemudian melawan orang-orang partai KSC sendiri. Perubahan-perubahan politik selanjutnya di Cekoslowakia, baru terjadi setelah Stalin dan Gottwald meninggal pada tahun 1953. Tak lama setelah Stalin meninggal segera timbul gelombang Destalinisasi di berbagai negara sosialis di Eropa Timur yang dimulai oleh Nikita Khrushchev di Uni Soviet, dengan pidato-pidatonya yang mengutuk 'kultus individu' di zaman Stalin. Namun di Cekoslowakia, Novotný tidak begitu tanggap dalam menjalankan perubahan- perubahan di bidang politik. Destalinisasi berlangsung lambat dibandingkan negara-negara sosialis lainnya dan baru dimulai pada tahun 1956. Sementara itu Novotný sendiri (yang sejak tahun 1957 juga merangkap jabatan Presiden) menjalankan kekuasaannya dengan cara konservatif dan tetap menjalankan sentralisme selama kira-kira 10 tahun. Ia masih melakukan pengekangan di bidang seni dan media-massa, walau pengendoran sebenarnya konservatisme di negara-negara komunis lain telah dimulai sejak Stalin meninggal. Walau akhirnya Novotný mengeluarkan liberalisasi dalam batas-batas tertentu dan mendekritikan rehabilitasi terhadap tokoh-tokoh partai yang telah mati di zaman Gottwald, Novotný masih tetap membina hubungan baik dengan Moskow. Sikapnya yang kaku dan otoriter menyebabkan ia kurang populer di mata rakyat dan terlebih di kalangan mahasiswa.

Pada tahun 1967, Novotný mulai hilang kontrol, terutama setelah menguatnya suara-suara yang menuntut langkah-langkah perubahan dan pertanggung jawaban para pemimpin serta segera diadakannya pemilihan yang bebas dan wajar. Pada waktu yang bersamaan, di dalam tubuh partai mulai gerakan-gerakan yang menuntut adanya perubahan politik dan diperlonggarnya kendali Uni Soviet. Di pihak lain, golongan konservatif di dalam berusaha keras mempertahankan sistem yang ada dan mencurigai arah perubahan- perubahan tersebut sebagai anti-pemerintah.

Sementara itu keadaan politik yang bergejolak, diperparah pula oleh perkembangan di bidang ekonomi negara yang semakin memburuk. Pada akhir tahun 1967 pertarungan di dalam tubuh Partai Komunis Cekoslowakia (KSC) semakin memuncak.

Dalam kongres partai tanggal 5 Januari 1968, setelah Novotný melihat dukungan terhadap dirinya yang semakin berkurang, Dia meletakkan jabatan dan menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya, Alexander Dubček. Dubček dan kelompok yang tidak puas dengan kondisi politik dan ekonomi pada waktu itu, memulai gerakan reformasi dan liberalisasi melalui Musim Semi Praha (yang kemudian terkenal dengan istilah Pražské jaro 1968 (*The Prague Spring* 1968)). Mereka memperkenalkan ide-ide alternatif tentang sosialisme yang diberi nama Sosialisme berwajah manusia, yang dicurigai dan ditentang oleh kubu konservatif.



Peristiwa *The Prague Spring* tahun 1968

Dubček mendapat dukungan luas di masyarakat karena ia berusaha meninggalkan watak represif rezim komunis, memberikan berbagai kebebasan kepada masyarakat dan memberi kebebasan kepada terbentuknya organisasi-organisasi sosial dan politik di luar kontrol Partai Komunis Cekoslowakia (KSC).

Kalangan cendekiawan bersuara lantang dan menuntut lebih banyak lagi liberalisasi dan demokratisasi, sementara itu di pihak lain, perkembangan yang terjadi di masyarakat, membuat kubu konservatif atau 'garis keras' partai, serta pimpinan Uni Soviet dan Pakta Warsawa semakin khawatir dan berusaha memaksa Dubček agar mengurungkan niatnya melanjutkan liberalisasi.

Mereka mengkhawatirkan Dubček tidak mampu dan kehilangan kendali atas situasi politik dan ekonomi Cekoslowakia. Pimpinan Uni Soviet, Leonid Brezhnev dan pemimpin-pemimpin Blok Timur lainnya berusaha keras membatasi arus liberalisasi di Cekoslowakia dengan melakukan berkali-kali perundingan dengan pihak Dubček dan kawan-kawan. Dalam perundingan-perundingan tersebut, Dubček dan tokoh reformis Partai Komunis Cekoslowakia (KSC) lainnya berusaha meyakinkan Uni Soviet bahwa dirinya adalah tetap sekutu tepercaya Uni Soviet dan reformasi adalah masalah dalam negeri yang bisa ia atasi. Walau Dubček dalam perundingan-perundingan menerima saran-saran dari sekutunya, tetapi yang terjadi di lapangan adalah perkembangan yang semakin memprihatinkan bagi Uni Soviet. Di lain pihak, kubu garis keras Partai Komunis Cekoslowakia (KSC), yang semakin tidak didengarkan oleh pendukung-pendukung reformasi, berkedudukan kepada Uni Soviet agar bertindak untuk mengatasi keadaan.

Akhirnya pada 20 Agustus 1968 malam, pasukan-pasukan Uni Soviet dan Pakta Warsawa menyerbu Cekoslowakia dari segala pintu negara yang dibatasi dalam waktu 24 jam. Dubček dan pejabat-pejabat Cekoslowakia yang lainnya diculik dan diterbangkan ke Moskow untuk berunding dengan pemimpin-pemimpin Uni Soviet.

Pimpinan Partai Komunis Cekoslowakia (KSC) lainnya juga didatangkan pula ke Moskow, baik dari kubu reformis, konservatif maupun yang sentris (tengah).

Dubček dan kawan-kawannya setelah 6 hari perundingan yang melelahkan, akhirnya sudah menyatakan menerima dan menyetujui kesepakatan yang bernama Protokol Moskow tersebut dan pulang kembali ke Praha pada tanggal 27 Agustus 1968. Perombakan besar-besaran kemudian segera terjadi di dalam partai dan pemerintahan, di bawah tekanan dan kontrol dari penasehat-penasehat politik dan militer Uni Soviet. Segera setelah perombakan dilakukan, menyusul laporan besar-besaran di dalam partai.

Seluruh pengikut-pengikut Dubček diganti secara bertahap dengan orang-orang Partai Komunis Cekoslowakia (KSC) yang pro-Soviet di bawah pimpinan Gustáv Husák. Dubček sendiri masih dibiarkan sampai April 1969 namun semua hasil-hasil reformasi yang telah dicapai, dianulir atau dikembalikan oleh rezim baru ke kondisi sebelum Reformasi 1968.

Stabilisasi kekuasaan dan terpilihnya Gustáv Husák sebagai Sekretaris Jenderal dari Partai Komunis Cekoslowakia (KSC) asal Slowakia sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Cekoslowakia (KSC) yang pernah dipenjara pada masa pemerintahan Slowakia yang pro-Nazi Hitler di bawah pimpinan Jozef Tiso atau pada zaman Stalinisme melanda Cekoslowakia. Husák mengambil sikap moderat pada waktu terjadi euforia Musim Semi Praha 1968.

Bagi kubu reformis pilihan itu lebih baik tanggung jawab kepemimpinan partai dipegang oleh Bilák atau Kolder, yang juga pengikut garis keras di dalam partai KSC. Husák segera melaksanakan Protokol Moskow dan mendapatkan kepercayaan dari Brezhnev dan Pakta Warsawa untuk segera melakukan pelayanan di tubuh partai dan birokrasi secara bertahap dan juga mengembalikan garis partai kepada program-program partai sebelum naiknya Dubček. Kebijakan reformis yang diputuskan di zaman Dubček dianulir, terkecuali seluruh yaitu federalisasi negara bagian Ceko dan Slowakia.

Dalam awal-awal masa Normalisasi dan Stabilisasi (yang disebut juga 'masa status quo') tersebut, keadaan ekonomi negara sedang mengalami pertumbuhan yang baik. Pada akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an, keadaan status quo politik mulai mencair.

Timbul gerakan Piagam 77 atau lebih dikenal dengan nama Charta 77 pada tahun 1977 yang dimotori oleh pengarang Václav Havel dan kawan-kawan. Gerakan ini segera mendapat dukungan luas, dari 243 penandatangan pada tahun 1977, pertengahan tahun 80-an telah mencapai 12.000 orang penandatangan. Para pimpinan partai komunis KSC kewalahan menghadapi gejolak-gejolak baru di masyarakat, ternyata bukan berasal dari pertentangan-internal di dalam partai. Berbagai masyarakat di luar partai masih tetap kehadiran pasukan Rusia sebagai okupasi suatu negara oleh negara lain, dan bahwa perjuangan untuk kebebasan dan perlindungan HAM adalah bentuk kelanjutan dari semangat patriotisme dan reformasi 1968.

Pada pertengahan dekade 1980an, tanda-tanda keruntuhan Cekoslovakia mulai terlihat. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang runtuhnya Cekoslovakia, antara lain adanya krisis ekonomi Cekoslovakia pada tahun 1985, melemahnya sistem komunisme di negara-negara Eropa Timur, terjadinya krisis di Uni Soviet yang merupakan negara panutan dari Cekoslovakia, munculnya aktivis-aktivis revolusioner yang ingin memperjuangkan demokratisasi keruntuhan Cekoslovakia ditandai dengan diumumkannya Revolusi Beludru pada November 1989.

Revolusi Beludru merupakan gerakan yang menuntut transisi kekuasaan dan perubahan sistem pemerintahan Cekoslovakia secara damai. Revolusi Beludru bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslovakia dari komunis menjadi demokatis. Dalam jurnal *Environmental Movement* di Republik Ceko (2016) karya Kurnia Novianti, pecahnya Revolusi Beludru bermula dari surutnya kekuasaan komunis di Cekoslovakia. Kebijakan *Glasnost* (keterbukaan) dan *Perestroika* (restukturisasi) yang diterapkan Uni Soviet berhasil membuka jalan perjuangan masyarakat Cekoslovakia untuk melakukan Revolusi Beludru.

Vaclav Havel memimpin jalannya Revolusi Beludru 1989. Ia melakukan mobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah. Selama bulan November hingga Desember 1989, mereka terus menuntut adanya restrukturisasi politik dan pemberlakuan demokrasi kepada pemerintah. Gerakan demonstrasi massa dalam Revolusi Beludru dilakukan secara tenang dan damai.

Pada perkembangannya, Revolusi Beludru mampu menumbangkan kekuasaan rezim komunisme di Cekoslovakia, pasca Revolusi Beludru, Cekoslovakia mengangkat presiden Vaclav Havel sebagai presiden sementara. Pada tahun 1992, Vaclav Havel mengusulkan untuk mengubah nama Republik Federasi Sosial Cekoslovakia menjadi Republik Cekoslovakia. Namun, usulan tersebut ditolak oleh pihak Slovakia. Setelah mengalami kegagalan dalam negosiasi, Slovakia memutuskan untuk memisahkan diri dari Cekoslovakia. Pada Januari 1993, secara resmi Cekoslovakia runtuh dan pecah menjadi dua negara berdaulat yaitu, Republik Ceko dan Slovakia.

Penutup.

Diplomasi merupakan langkah penting dalam melaksanakan negosiasi, karena salah satu pemicu konflik yaitu karena salah dalam melaksanakan diplomasi. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi seluruh negara adalah selalu mengedepankan diplomasi dalam melaksanakan hubungan kerjasama antar negara.

Berdasarkan pada pembahasan Revolusi Berudu di negara disimpulkan sebagai berikut : 1) Revolusi Berudu adalah revolusi bersejarah bagi negara Ceko dan Slovakia. Dengan adanya revolusi Berudu membuat Cekoslovakia berpisah secara damai menjadi dua negara yaitu Ceko dan Slovakia. 2) Kurangnya diplomasi antar negara akan berdampak buruk pada kehidupan bernegara. 3) Komunisme di negara Cekoslovakia menyebabkan negara Cekoslovakia pecah membuktikan bahwa paham komunis tidak baik. 4) Melalui diplomasi akhirnya konflik yang melanda antara Jerman dengan Cekoslovakia berakhir dengan damai, yang ditandai dengan berpisahnya negara Cekoslovakia secara damai menjadi negara Ceko dan Slovakia. Strategi dalam berdiplomasi akan berkembang terus dari masa ke masa. Semua pemikiran dan kreativitas para pemimpin dikerahkan untuk memberikan pemahaman tentang hakekat dari sebuah diplomasi dan bagaimana melaksanakan diplomasi yang benar.



KEMBALINYA

HONG KONG KE TIONGKOK

TIM POK PASIS DIKREG 60 SESKOAD TA 2021

Pendahuluan

Hong Kong merupakan salah satu kota di dunia sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata yang terkenal, populasi Hong Kong saat ini terdiri dari 93.6% etnis Tionghoa, sedangkan beberapa di antaranya adalah orang India, Pakistan, Nepal, Vietnam, Inggris, Amerika, Kanada, Korea, Jepang, Indonesia dan Filipina yang bekerja di sektor jasa, komersial dan keuangan. Setelah kekalahan Tiongkok di Perang Opium Pertama dari Kerajaan Inggris, Hong Kong menjadi koloni Inggris dengan diserahkannya Hong Kong, kemudian diikuti Semenanjung Kowloon tahun 1860 dan penyewaan 99 tahun *New Territories* tahun 1898.

Setelah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia II, Inggris kembali mengontrol Hong Kong hingga 30 Juni 1997. Peluang terbuka setelah Tiongkok memperoleh kursi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari Resolusi Majelis Umum PBB 2758 pada 1971. Perjuangan diplomatik merebut kembali Hong Kong semakin masif dilakukan. Pada 19 Desember 1984, digelar Deklarasi Bersama Tiongkok Inggris di Beijing. Hasilnya, pemerintah Tiongkok mempersilakan kepada Inggris untuk melanjutkan kedaulatannya atas Hong Kong hingga 1 Juli 1997. Setelah periode itu usai, Inggris harus mengembalikan

Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok.

Maka sejak 1 Juli 1997, seluruh wilayah Hong Kong yang sebelumnya dikuasai Inggris kembali ke Tiongkok. Hong Kong menjadi daerah administratif khusus pertama Tiongkok dan dipimpin oleh seorang Kepala Eksekutif. Namun, pemerintah Tiongkok belum bisa mengontrol Hong Kong secara penuh sampai dengan 50 tahun setelah penyerahan dari Inggris, sesuai dengan kesepakatan. Hong Kong memang termasuk wilayah Tiongkok, tapi punya sistem berbeda dan berhak mengatur pemerintahan sendiri mempunyai status secara khusus, yaitu berupa wilayah administratif khusus. Dalam prinsip satu Negara dua sistem (*One country, two systems*) sampai tahun 2047.

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: *"Bagaimana penerapan prinsip Hongkong Satu Negara Dua Sistem?"* Adapun pokok permasalahan dalam rumusan masalah yaitu Pertama, Pengaruh penerapan prinsip *One Country Two System* oleh Tiongkok, Kedua, perundingan Hongkong ke dalam Tiongkok. Pemecahan masalah merupakan tujuan utama dalam pembahasan ini dengan harapan akan menemui keselarasan antara judul dengan pokok permasalahan.



Peta wilayah Hong Kong

Pembahasan

Kebijakan satu negara dua sistem adalah kebijakan politik yang dicetuskan pertama kali oleh pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping pada tahun 1987. Salah satu kebijakan sistem pemerintahan yang diterapkan adalah *Hong Kong Special Administration Regions (HKSAR)*. Dimana *Special Administration Regions* adalah sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Tiongkok dengan menggunakan prinsip “one country two system”. Prinsip “Satu Negara Dua Sistem” ialah dimana hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan yang menjadi wewenang dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sedangkan bidang-bidang lain seperti mata uang, ekonomi dan perdagangan serta diberikan kebebasan di dalam memilih pemimpin, parlemen, membentuk hukum serta dapat melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa negara lain. Sebelumnya Tiongkok menerapkan prinsip *One China Policy* kepada Taiwan, tetapi hal ini tidak dilakukan kepada Hong Kong.



Pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping

Pengaruh Penerapan Prinsip *One Country Two System* Oleh Tiongkok

Kebijakan pemerintah Tiongkok *One Country Two System* merupakan suatu bentuk upaya dalam menyatukan beberapa wilayah Tiongkok yang menjadi daerah kolonial negara barat dan juga wilayah tersebut sudah menerapkan sistem dari pemerintah yang lama sehingga sudah menyatu dalam kehidupan warganya. Sebenarnya pada awal kebijakan ini dirumuskan oleh Deng Xiaoping pada masa pemerintahannya, konsep *Special Administrative Region* oleh Tiongkok dimaksudkan untuk menarik simpati dari wilayah itu agar mereka yang kembali kepada Tiongkok. Adapun yang diberikan adalah mereka mendapatkan otonomi yang lebih tinggi serta kebebasan dalam mengatur sistem ekonomi maupun politik di wilayahnya masing-masing.

Hongkong diberikan *Special Administration Regions (HKSAR)* berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Tiongkok, dilihat dari sejarahnya Hong Kong merupakan daerah koloni dari Inggris, dimana Inggris mulai menduduki Hong Kong sejak tahun 1842. Di bawah kolonial Inggris, Hong Kong menjadi pusat perdagangan dan kota industri yang maju akan tetapi Hong Kong sempat mengalami krisis ketika Tiongkok mendapatkan sanksi embargo dari PBB akibat perang Korea pada tahun 1950, namun ketika perang Korea berakhir pada tahun 1953 perekonomian Hong Kong mulai bangkit lagi dan menunjukkan hasil yang signifikan bagi pertumbuhannya. Hal ini membuat Hong Kong memiliki fokus yang sangat besar dalam bidang perekonomian dibandingkan bidang politik. Mungkin perbedaan paling signifikan antara Tiongkok dan Hong Kong adalah bahwa Tiongkok adalah penganut komunis sementara Hong Kong memiliki demokrasi yang terbatas. Di Hong Kong pimpinan tertinggi adalah Kepala Eksekutif yang dijabat selama selama lima tahun dan maksimum dua kali jabatan. Kepala Eksekutif ini menggantikan jabatan Gubernur Hong Kong saat masih menjadi koloni Inggris. Hong Kong juga memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri polisi, organisasi distrik dan pegawai negeri, secara luas berdasarkan mode hukum umum Inggris.

Namun, untuk masalah kepemilikan tanah dan keluarga, Hong Kong beralih ke model hukum adat Tiongkok. Hal ini muncul diakibatkan kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok dan adanya beberapa hal yang memang harus disepakati oleh Hong Kong dan Tiongkok dalam proses penyatuan kembali wilayah yang sebelumnya terpisah.

Dengan diterapkannya *system One Country Two System* maka Hong Kong masih menggunakan sistem pemerintahan yang lama sehingga tidak membutuhkan penyesuaian lagi, perbedaan di sini antara Tiongkok dan Hong Kong adalah sistem komunis dan demokrasi sehingga ada perbedaan sistem yang berlaku di pemerintahan dan masyarakatnya, apabila Tiongkok memaksakan menggunakan sistem komunis maka akan timbul gejolak pada masyarakat Hong Kong. Hal ini akan menyebabkan penolakan masyarakat sehingga mengganggu stabilitas ekonomi dan politik yang ada di Hong Kong. Penerapan *One Country Two System* ini juga bertujuan bagi pemerintah Tiongkok untuk mempersatukan wilayahnya yang lain, dengan berhasilnya penerapan sistem ini maka sistem ini akan dapat diberlakukan di wilayah lain yang menjadi bekas kolonial Inggris di wilayah dataran Tiongkok. Akan tetapi, tidak semudah itu pemerintah Tiongkok menerapkan sistem *One Country Two System*, hal ini terlihat dari penolakan Taiwan yang sampai dengan sekarang masih menolak pemerintah Tiongkok. Mengenai Taiwan, pemilihan kembali Presiden Tsai Ing-wen menentang kebijakan "satu negara, dua sistem" menunjukkan kebijakan itu ditolak di sana. Selama beberapa dekade, Beijing telah berusaha membujuk Taipei untuk secara damai menyatukan Taiwan dengan Tiongkok di bawah kebijakan tersebut.

Perundingan Hong Kong ke dalam Tiongkok

Integrasi yang terjadi antara Hong Kong dan Tiongkok merupakan satu bentuk penyelesaian permasalahan berupa perbedaan prinsip ataupun sistem yang diterapkan, sehingga muncul suatu kendala dalam penyatuan kembali kedua komponen ini. Walaupun demikian, Tiongkok berusaha menawarkan berbagai hal sebagai bentuk negosiasi dengan

Hong Kong termasuk pemerintahan Inggris yang masih memiliki hak untuk menentukan Hong Kong pasti atau tidak akan kembali ke pangkuan Tiongkok.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada Hong Kong yaitu Tiongkok akan menjalankan kebijakan *One Country Two System* dan *Hong Kong Special Administrasian Region (HKSAR)* sebagai salah satu bentuk praktek dalam pelaksanaannya. Konsep ini merupakan salah satu cara negosiasi yang dilakukan oleh Tiongkok agar Hong Kong menerima tawaran dari Tiongkok untuk bergabung kembali dan berada di bawah kedaulatan Tiongkok, sesuai dengan tujuan reunifikasi damai yang menjadi kepentingan Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok meresmikan kedaulatan Hong Kong pada tanggal 1 juli 1997, setelah pelaksanaan kedaulatan Hong Kong akan berada di bawah wewenang pemerintah Tiongkok dan akan menikmati otonomi tingkat tinggi antara lain sistem pemerintahan akan diurus sendiri oleh penduduk asli Hong Kong, bidang sosial dan ekonomi saat ini tetap tidak berubah, kebebasan gaya hidup, pers, industri, asosiasi, transportasi, korespondensi, dan kepercayaan keagamaan akan dipastikan kebebasannya.

Hong Kong tetap menjadi pelabuhan bebas dan pusat kerja sama ekonomi dengan berbagai negara asing. Dengan menjadi wilayah bagian dari Tiongkok, Hong Kong akan lebih leluasa dalam menjalankan beberapa kerjasama baik pemerintah, organisasi, budaya dan lainnya dengan wilayah bagian Tiongkok lainnya. Pemeliharaan ketertiban umum di Hong Kong akan menjadi tanggung jawab pemerintah Hong Kong. Semuanya itu tertuang dalam *Sino-British Joint Declaration*.

Hong Kong merupakan satu wilayah bagian Tiongkok yang memiliki tingkat negosiasi yang baik dikarenakan kemajuan Hong Kong dalam bidang ekonomi mampu menjadi faktor kualitas keberhasilan negosiasi yang dilakukan oleh Hong Kong kepada Tiongkok. Pendekatan utama Hong Kong untuk bernegosiasi dalam ranah kerja sama ekonomi. Tsang Yok Sing ketua partai aliansi demokrasi untuk Hong Kong merasa optimis dengan tekad Tiongkok

untuk mempertahankan Hongkong seperti berada di bawah pemerintah Inggris. Sang berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi Hong Kong ialah melalui pendekatan dan dialog dengan Tiongkok. Hong Kong tidak punya pilihan lain karena secara historis Hongkong harus kembali pada Tiongkok pada tanggal 1 Juli 1997.

Negosiasi di Hong Kong berlangsung secara damai, jika ada pertikaian diantara kedua belah pihak maka diadakan kompromi yang mana bertujuan untuk menyatukan kembali kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kerjasama yang dilakukan. Ketika perundingan terjadi antara Hong Kong, Tiongkok dan Inggris mengenai persoalan pengembalian Hong Kong ke dalam Tiongkok, hasil dari perundingan yang dilakukan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi pelaksanaan perjanjian berlangsung sangat cepat sampai diresmikannya Hong Kong kembali ke Tiongkok. Adanya penawaran diantara kedua pihak terutama berdasar dengan *Hong Kong Special Administrasian Region (HKSAR)* yang dikemukakan oleh Tiongkok dalam menjawab pertanyaan Hong Kong, sebagai bentuk konsesi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Hong Kong, sehingga ketika Hong Kong bergabung dengan Tiongkok, Hong Kong menjadi salah satu

wilayah administratif khusus yang memiliki otonomi yang sangat tinggi. Pengambilan keputusan Hong Kong dalam perundingan ini juga disertai dengan dorongan pihak lain, dimana Hong Kong sendiri berani mengambil resiko atas apa yang telah diputuskan. Di sisi lain, ada pengaruh Inggris, yang menentukan kesepakatan dan diikuti ke dalam perjanjian. Dengan dilakukan integrasi ini, Hong Kong pada akhirnya kembali ke Tiongkok dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak serta adanya penyerahan secara resmi oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Tiongkok.

Penutup

Hong Kong merupakan wilayah bagian dari negara Tiongkok yang telah dikembalikan oleh Inggris di tahun 1997 setelah kurang lebih 150 tahun menjadi wilayah Kolonial Inggris, dibawah kekuasaan Inggris Hong Kong berkembang dengan sangat cepat dan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan keuangan dunia.

Kemudian pada 1982, Inggris dan Tiongkok memulai perundingan mengenai prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke Tiongkok. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi dan politik yang sangat berbeda dengan Tiongkok. Dengan adanya pemindahtempatan kedaulatan dari Inggris ke Tiongkok menciptakan suatu gejolak baru dimana rakyat Hong Kong ingin berdiri sendiri dan menjadi negara berdaulat seutuhnya. Namun Pemerintah Tiongkok memilih untuk melakukan proses integrasi dengan Hong Kong dengan menjadikannya sebagai daerah *Special Administrasian Region* atau wilayah administrasi khusus.

Kebijakan ini muncul diakibatkan adanya dua prinsip atau ideologi yang berbeda. Tiongkok merupakan satu wilayah yang menggunakan sistem sosialis, sedangkan wilayah Hong Kong merupakan wilayah yang menggunakan sistem kapitalis. Untuk menyatukan kembali beberapa wilayah ini, Tiongkok tidak menggunakan cara pemaksaan dan menggunakan sistem sosialis seperti beberapa wilayah bagian yang ada di daratan Tiongkok. Dengan perkembangan jaman serta pemikiran yang berbeda maka Tiongkok mencari cara untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah bagian yang terpisah menjadi koloni negara lain dengan tidak mengganti sistem yang sudah ditetapkan. Meskipun Tiongkok menerapkan kebijakan baru One Country Two System bukan berarti kebijakan Tiongkok sebelumnya One China Policy dihapuskan, kebijakan satu Tiongkok ini masih aktif sampai sekarang. Pemberian HKSAR dari pemerintah Tiongkok kepada Hongkong merupakan keuntungan tersendiri, kebebasan yang di berikan oleh pemerintah Tiongkok kepada Hong Kong antara lain kebijakan untuk menentukan sendiri urusan dalam negeri dengan harapan menekan pergolakan yang terjadi di masyarakat Hon Kong. Seharusnya dengan memandang luas wilayah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka dengan Hong Kong kembali ke Tiongkok akan memberikan keuntungan- keuntungan tambahan yaitu tingkat ekonomi yang lebih kuat, perkembangan wilayah dihadapkan dengan pertumbuhan penduduk serta pertahanan dan keamanan yang semakin meningkat.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PIAGAM PENGHARGAAN

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada:

*Pimpinan Redaksi beserta Staf
Buletin Virajati (Seskoad Online)*

atas partisipasi pada

UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021
MELALUI VIDEOCONFERENCE

Jakarta, 17 Agustus 2021

Kepala Sekretariat Presiden
selaku
Ketua Panitia Pelaksana Peringatan
Hari Ulang Tahun ke-76
Kemerdekaan Republik Indonesia
Tahun 2021



Heru Budi Hartono



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani



ISSN 2086-9312



9772086931295